

PENGARUH GERAKAN ACEH MERDEKA TERHADAP
STABILITAS KAWASAN ASIA TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Uswatun Hasanah

NIM. 970910101003

Pembimbing

Drs. H. Nuruddin M. Yasin

NIP. 130518486

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2002



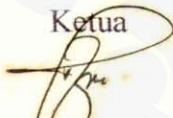
PENGESAHAN

Diterima dan di pertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1(SI) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Hari : Sabtu
Tanggal : 12 Oktober 2002
Pukul : 10.00 WIB

Panitia Penguji

Ketua



Drs. Asrial Aziz

NIP: 130355412

Sekretaris



Drs. H. Nuruddin M. Yasin

NIP: 130518486

Susunan Panitia Penguji :

1. Drs. Asrial Aziz
2. Drs. H. Nuruddin M. Yasi
3. Drs. Achmad Habibullah, M,si
4. Drs. Supriyadi, M,si



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Drs. MOCH.TOERKI

NIP : 130524832

PERSEMBAHAN

Kini terbukti sudah segala usaha dan do'a menjadikan segala asa menjadi nyata meskipun menjadi "sesuatu yang tertunda" Maha Besar Allah karunia- Mu telah memberi nafas bagi langkah-langkah kecil ini.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati karya ini ku persembahkan kepada :

- Ayahanda H. Akar Ibrahim (Alm) yang tak pernah berhenti memberikan dorongan, mencurahkan perhatian dan kasih sayang sehingga penulis bangkit dari keengganan selama ini.
- Ibundaku tercinta yang penuh kasih sayang telah membimbing, mendidik, mengayomi dan berdo'a demi terwujudnya cita-citaku.
- Saudara-saudaraku tersayang : kak Rosdiana, Dra. Susmiati Aida, Ahdiyati Mulyajati, SH, Sri Istiqomah, Spd, Siti Zainab, Amd, Istiana dan Lilia Sari terima kasih atas perhatian tulus yang kalian berikan.
- Para Guru dan dosen-dosenku terima kasih atas kesabaran dalam mendidik, membimbingku selama ini.
- Agama dan Bangsa
- Almamaterku tercinta Universitas Jember.

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman ! Hendaklah kamu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum (seseorang) menjerumuskanmu untuk tidak berlaku adil, lakukanlah keadilan ! keadilan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan .

(Q.S. Al-Maidah Ayat:8)

Dan siapa menyerah penuh kepada Allah serta berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia lebih berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh, dan kepada Allah jualah kesudahan segala urusan

(Q.S. Lukman ayat :22)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**Pengaruh Gerakan Aceh Merdeka terhadap Stabilitas Kawasan Asia Tenggara.** Selama proses penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan-bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak. Peran mereka sangat besar artinya bagi penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Nuruddin M. Yasin, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Drs. Achmad Habibullah Msi, selaku dosen wali penulis selama kuliah.
3. Bapak Drs. Syoekron Syah, SU selaku ketua jurusan Ilmu hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
5. Teman-teman di jurusan Hubungan Internasional angkatan 97
6. Keluarga Besar Bapak Samsuri di Jawa VIII No. I terima kasih atas nasehat serta motivasinya, sehingga penulis bangkit lagi dari keengganan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman di Jawa VI No. 26 A dan Jawa VI No. 45 E terima kasih atas dukungan dan partisipasinya.
8. Teman-teman terbaikkku Elly, Atik, dan Farida.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan disini, terima kasih telah membantu penulis menyelesaikan tugas ini.

Jember, 12 Oktober 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.3 Batasan Materi.....	9
1.4 Batasan Waktu.....	9
1.5 Permasalahan.....	10
1.6 Kerangka Dasar Teori.....	13
1.7 Hipotesis	13
1.7.1 Metode pengumpulan Data.....	14
1.7.2. Metode Analisa Data	14
1.8. Metode Pendekatan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM KEADAAN DAERAH ISTIMEWA ACEH	
2.1 Identifikasi Daerah Istimewa Aceh	17
2.1.1 Sejarah Terbentuknya Daerah Istimewa Aceh	19
2.1.2 Latar Belakang Kebudayaan.....	21
2.2 Aceh Sebelum dan Setelah Indonesia Merdeka	24
2.3 Aceh Pasca Soeharto	32
BAB III STABILITAS DAN KEAMANAN DALAM NEGERI	
3.1 Pengaruh Gerakan Aceh Merdeka Terhadap Stabilitas Politik dalam Negeri.....	39
3.2. Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Aceh	43

3.4 Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh.....	47
a. Negosiasi Melalui Dialog dan Kompromi.....	47
b. Otonomi Daerah	50
3.5. Melemahnya Peran Indonesia Di ASEAN Akibat Konflik.....	57

**BAB IV IMPLIKASI GAM TERHADAP STABILITAS KAWASAN
(ASEAN)**

4.1. Pengaruh Gerakan Aceh Merdeka Terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN.....	.63
4.2. Sikap ASEAN Terhadap Gerakan Aceh Merdeka68
4.3 Dukungan Negara-negara ASEAN terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	75

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1
2. Lampiran 11
3. Lampiran 12
4. Lampiran 13





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberontakan di Aceh sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1953-1969 yaitu pemberontakan DI/TII dengan berbagai permasalahan yang melingkupinya. Mulai dari kisah-kisah peperangan melawan Kolonial Belanda, sampai dengan munculnya gerakan separatisme Aceh yang lebih dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1970-1990.

Pemberontakan DI/TII tahun 1953 dibawah pimpinan Teuku Daud Beureueh dipicu oleh pernyataan Aceh dengan Tapanuli dan Sumatra Timur menjadi provinsi Sumatra Utara pada tahun 1950. Peleburan Aceh kedalam provinsi Sumatera itu sangat menyakitkan masyarakat Aceh, karena dengan begitu pemerintah pusat telah mengingkari janjinya untuk memberikan status otonom yang luas kepada Aceh. Terlebih lagi wilayah Aceh merupakan wilayah yang memiliki andil dalam pembangunan dan pertumbuhan Republik Indonesia.

Besarnya peranan Aceh bagi bangsa Indonesia terbukti dengan kegigihan para pejuang Aceh dalam mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda. Pada waktu itu kedatangan Bung Karno ke Aceh dan bertemu dengan Teuku Daud Beureueh untuk mengumpulkan dana pembelian pesawat terbang bagi Indonesia. Masyarakat Aceh dengan tangan terbuka rela mengumpulkan uang dan emas untuk kemudian digunakan pemerintah untuk membeli pesawat terbang Republik Indonesia yang pertama, yaitu Seulawah RI- 001 dan Dakota 002.

Kedatangan Bung Karno kedua kalinya ke Aceh tahun 1948 adalah dalam rangka meminta Teuku Daud Beureueh agar masyarakat Aceh mau berjuang secara aktif melawan Belanda. Permintaan itu di setujui oleh Teuku Daud Beureueh dengan syarat diperbolehkan menjalankan syariat Islam. Namun setelah kemerdekaan Indonesia berhasil diperoleh, janji pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Aceh menggunakan syariat Islam tidak dipenuhi bahkan daerah otonom yang dimiliki Aceh dihapuskan, diganti dengan status kresidenan.

Teuku Daud Beureueh dicurigai oleh pemerintah akibatnya hubungan antara Aceh dengan pemerintah pusat menegang dan timbul keinginan untuk membentuk negara Islam Aceh tahun 1953 yang lebih dikenal dengan nama pemberontakan DITII. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu periode 1976 muncul kembali upaya untuk memperoklamsikan Aceh Merdeka yang di pimpin oleh Hasan Tiro. Tokoh ini datang ke Aceh setelah belajar dari Amerika dan berupaya untuk memperoklamsikan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 14 Desember 1976 di wilayah Kabupaten Pidie.

Pemberontakan ini menuntut penerapan syariat Islam dalam arti yang lebih luas, menyangkut aspek politik, ekonomi, dan budaya. Muncul dugaan bahwa lahirnya GAM Hasan Tiro terkait dengan mulai hilangnya keistimewaan Aceh sebagai wilayah yang otonom. Hal ini terjadi seiring diberlakukannya UU No. 5 \1974 tentang pemerintahan Daerah, UU No 5\ tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan UU pokok kehutanan maupun UU pokok pertambangan, yang membuktikan politik dominasi atau sistem sentralistik yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Munculnya GAM ini menurut pemerintah merupakan separatisme. Sehingga pemerintah mengambil tindakan tegas dalam menangani GAM Hasan Tiro yang dianggap sebagai Pengacau Keamanan (GPK).

Hasan Tiro dan pengikutnya kemudian dipenjarakan dan diperlakukan secara kekerasan. Hasan Tiro sendiri melarikan diri ke luar negeri dan mendirikan pemerintahan di pengasingan untuk terus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Aceh. Selang sepuluh tahun kemudian 1989-1999, muncul kembali gangguan keamanan di Aceh. Dengan alasan demi menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah melakukan pendekatan militer dan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menghadapi GAM serta untuk menjamin keamanan di Aceh. Tiga daerah dianggap sebagai basis GAM dan sebagai daerah tempat beroperasinya industri-industri besar di Aceh yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur.¹ Munculnya pemberontakan bersenjata Teuku Daud Beureueh tahun 1970-an, dan

¹ Rita Sihbudi (at.al) *Bara dalam Sekam : Indonesia Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Jakarta, Papua, Riau*. Mizan. Bandung, 2001. Hal 35-38

pemberontakan Hasan Tiro sejak 1976, dan munculnya gerakan protes sipil sejak 1998 adalah akibat langsung dari sikap pemerintah pusat yang terlalu sentralistik dan militeristik. Namun ketiga bentuk perlawanan rakyat ini memiliki latar belakang yang berbeda tetapi tetap dalam kerangka identitas ke Aceh. Identitas disini dipahami dalam konsepsi psikologik, yakni sebagai cara pandang, cara bersikap, cara bertindak, cara merasa masyarakat Aceh atas kehidupannya. Cara-cara inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan sistem kehidupan masyarakat Aceh.

Pengertian ini bermakna bahwa identitas itu memiliki dua bentuk : *Citra diri* dan *harga diri*. Jika harga diri lebih dipahami sebagai *sistem sosial, budaya, agama, politik, dan sistem ekonomi* maka harga diri lebih dipahami sebagai *cara masyarakat Aceh dalam melihat harkat dan martabatnya*. Sebutan masyarakat aceh yang religius, pantang menyerah, kritis, atau berani adalah masuk dalam kategori identitas keacehan dalam arti harga-diri.²

Kurun waktu 1990-1998, pemerintah pusat melalui aparat melakukan tindak kejahatan terhadap GAM dan rakyat. Tindakan kejahatan itu berupa pembunuhan, pemerkosaan, atau penganiayaan baik secara fisik maupun mental, penangkapan dan penahanan kepada seseorang (penculikan atau penghilangan paksa). Akibat kekejaman militer yang dilakukan pada masa DOM tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan akhirnya banyak rakyat bergabung dengan GAM.

Kekecewan yang mendalam dan menganggap pemerintah tidak berlaku adil, menindas rakyat Aceh dan terkesan tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah dengan sungguh-sungguh mengakibatkan semakin meningkatnya dukungan rakyat terhadap GAM. Dalam pandangan mereka GAM adalah tempat meminta perlindungan dari kekejaman militer dan tempat rakyat Aceh menyampaikan aspirasinya yang tidak tertampung oleh pemerintah.

² DR. DANIEL DHAKIDAE. *Aceh, Jakarta, Papua.: Akar Masalah dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik*. YAPPIKA. Jakarta, 2001, Hal. 56-57

GAM merupakan media bagi rakyat Aceh untuk menyalurkan rasa dendamnya terhadap pemerintah pusat atau militer.³ Hingga saat ini eskalasi kekerasan di Aceh tidak semakin berkurang, tetapi semakin parah seiring dengan dicabutnya DOM dan gerakan reformasi, bahkan tindakan kekerasan meluas ke daerah-daerah lain seperti Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah. Padahal ketiga daerah tersebut pada masa diberlakukannya daerah operasi militer (DOM) relatif aman. Justru ketika DOM dicabut ketiga daerah tersebut menjadi wilayah tindak kekerasan baru semenjak adanya reformasi, dimana gerakan masyarakat sipil ini dilakukan melalui demonstrasi, mogok makan, pengungsian masal, memboikot pemilu, yang berujung pada keinginan untuk referendum.

Gerakan sipil yang terdiri dari organisasi mahasiswa, pelajar, pemuda, santri, dan ulama. Mereka menemukan jalan tengah yang tidak dengan cara kekerasan, yaitu melalui referendum. Tuntutan referendum ini menurut mereka sebagai upaya untuk menentukan masa depan rakyat Aceh dan ternyata mendapat sambutan dari rakyat Aceh. Tuntutan ini kemudian menjadi populer setelah dilakukan kongres mahasiswa dan pemuda Aceh serantau pada tanggal 1-14 februari 1999 dan puncak dari referendum sendiri disuarakan oleh kelompok Ulama dayah (HUDA) yang di deklerasikan di halaman Masjid Raya Baiturrahman tanggal 15 September 1999 di hadapan rakyat Aceh dan di hadiri oleh tokoh adat dan tokoh negara seperti K.H.Abdurrahman Wahid, Prof. Amin Rais, Matori Abdul Jalildan tokoh lainnya.⁴ Menurut mereka, harapan yang telah digantungkan rakyat Aceh selama ini kepada pemerintah pusat tidak menjadi kenyataan, melainkan berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Sehingga kini mereka tidak hanya menuntut otonomi khusus melainkan merdeka.⁵

Berbagai langkah yang di tempuh pemerintah selama ini belum juga bisa menyelesaikan masalah Aceh. Dalam menyikapi tantangan disintegrasi bangsa, pemerintah melakukan pendekatan melalui dialog dengan GAM di Jenewa pada tanggal 12 Mei 2000 sampai tanggal 2 September 2000. Pemerintah juga

³ Sayadi, Op.cit. Hal 69

⁴ Rita Sihbudi op.cit. Hal 45

⁵ DR. DANIEL DHAKIDAE. *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh, Jakarta, Papua*. YAPPIKA, Jakarta, 2001, Hal.61

melakukan jeda kemanusiaan ini yang kemudian diperpanjang waktunya hingga September 2000, dengan persyaratan, GAM harus bersedia memasuki dialog substantif. Jeda kemanusiaan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan di Aceh, menyalurkan bantuan keamanan serta untuk membangun saling percaya dan ditingkatkan ke pembahasan masalah politis.

Pemerintah juga mengambil langkah-langkah seperti melakukan upaya diplomasi yang optimal untuk menggalang dukungan eksternal untuk mencegah gejala disintegrasi bangsa Indonesia melalui diplomasi kepada pihak-pihak luar negeri dan kerjasama bilateral untuk mengupayakan agar negara-negara ASEAN tetap mendukung sepenuhnya stabilitas dan integritas wilayah Republik Indonesia.⁶ Dalam menghadapi tantangan disintegrasi di Indonesia ASEAN mengatakan tidak akan mendukung gerakan separatisme karena adanya kekhawatiran bahwa Asia Tenggara akan terjerumus dalam ketidakstabilan politik apabila Indonesia mengizinkan Aceh dan daerah rawan konflik lainnya memisahkan diri.⁷ Semetara itu Filipina menjadi negara yang pertama dari negara-negara ASEAN yang secara terbuka menyatakan ketakutannya terhadap ketidakstabilan regional akibat pecahnya negara tetangganya yaitu, Indonesia.

Beberapa negara di Asia Tenggara lainnya telah menunjukkan bahwa mereka mengalami beberapa gangguan keamanan domestik, yang juga mempengaruhi keamanan kawasan seperti peristiwa di Myanmar, dimana terjadi konflik yang berkepanjangan antara rezim militer negara itu dengan para pejuang demokrasi, kemudian konflik internal yang terjadi di Kamboja, gerakan separatis di Filipina gerakan fretelin dan kini gerakan separatis di Aceh, Papua, Maluku di Indonesia.

Masalah domestik tersebut memang mempunyai pengaruh yang potensial yang dapat mengancam stabilitas negara-negara Asia Tenggara, tetapi bagaimanapun masalah tersebut adalah masalah internal suatu negara dan menjadi tanggung jawab masing-masing negara. Karena dalam prinsip yang tercantum dalam TAC, terdapat kesepakatan bahwa negara-negara ASEAN tidak

⁶ Jurnal Luar Negeri, No 44, Hal 9-10

⁷ Suara Karya, 12 November 1999

diperkenankan mencampuri urusan domestik negara lain. Urusan domestik menadi hak sepenuhnya negara yang bersangkutan. Keterlibatan pihak luar hanya di mungkinkan bila mendapat persetujuan dari pihak yang berkepentingan karena itu ASEAN tidak ikut campur, dan menyerahkan pemecahan masalah itu kepada pemerintah yang bersangkutan . Hanya, memang beberapa kasus ASEAN terlibat sebagai mediator atas permintaan dan persetujuan pihak yang bersangkutan, seperti yang terjadi di Myanmar dimana ASEAN bertindak sebagai mediator antara pemerintah dengan pejuang demokrasi. Sesuai dengan stetment ASEAN dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang telah memainkan peran penting sebagai *Code of Conduct* dalam hubungan internasional di Asia Tenggara.

Prinsip didalam TAC mencakup antara lain: Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas nasional, hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan kekuatan eksternal, subversi, dan paksaan, tidak saling mencampuri urusan dalam negara, meyelesaikan perbedaan dan sengketa secara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekuatan, dan mengembangkan kerjasama regional diantara negara-negara Asia Tenggara.⁸ Dilihat dari isi dari stetment TAC diatas, disamping sebagai *Code of Conduct*, TAC juga memerankan upaya penyelesaian konflik secara damai, meskipun dalam kenyataannya TAC lebih berperan sebagai instrument diplomasi preventif, ini terbukti dengan keberhasilan ASEAN dalam mencegah munculnya konflik antar negara-negara ASEAN akan tetapi peran TAC sebagai Code of Conduct ini hanya berlaku dikawasan Asia Tenggara.⁹

Dewasa ini prinsip yang tercantum dalam TAC yaitu tidak ikut campu tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara tersebut dipertanyakan kembali oleh berbagai pihak, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi global. Hal itu dikemukakan dengan melihat fakta-fakta bahwa masalah domestik yang sedang dihadapi oleh satu anggota terkadang akan membawa dampak bagi anggota yang lainnya. Prinsip non intervensi ini sebenarnya telah

⁸ Gunnar Myrdal, dikutip dari I. Basis susilo (at.al) “ *Asia Tenggara Pasca Kamboja Antisipasi Indonesia* .” Laporan Penelitian Litbang Deplu- Universitas Airlangga. 1991\1992. Hal 26

⁹ Edy Prasetyo. “ *Masalah Perluasan Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* .” Dalam Bantarto Bandoro (ed). *Agenda dan Penataan Keamanan* . op.cit.Hal 124

ditinggalkan pada tahun 1997 menjelang masuknya Myanmar, Laos, Kamboja, kedalam ASEAN, akan tetapi ASEAN kembali ke prinsip ini, karena bagaimanapun prinsip tersebut pernah membuat kesuksesan bagi ASEAN. Berkaitan dengan hal tersebut, Deputi Malaysia saat itu mengajukan prinsip "positive engagement", yang memperbolehkan negara-negara ASEAN ikut memberi masukan kepada rezim militer Myanmar dalam hal ini penyelesaian masalah politik dalam negeri negara tersebut. Kemudian Thailand "flexibel engagement". Namun pada pertemuan AMM tahun 1999, ASEAN kembali mempertahankan bahwa mereka tetap memakai prinsip non intervensi tersebut.¹⁰

Bekaitan dengan adanya masalah Aceh khususnya mengenai semakin kuatnya eksistensi separatis GAM dan kejadian yang telah mengarah pada disintegrasi di Indonesia menjadi pembicaraan pada Pertemuan para menteri Luar Negeri ASEAN, Cina, Korea Selatan, dan Jepang (ASEAN+3). Para menteri Luar Negeri mengeluarkan pernyataan bersama mendukung kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan Indonesia, sebagai hasil pertemuan tingkat menteri Luar Negeri ketigabelas negara itu di Bangkok hari Sabtu(26/7). Dalam pernyataan bersama itu para menteri Luar Negeri menyebutkan menghargai langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk mencapai penyelesaian damai masalah Aceh dan Papua melalui dialog dan rekonsiliasi, yang sesuai dengan upayanya mempertahankan momentum pembaruan politik dan ekonomi.

Pernyataan secara kolektif para menteri luar negeri ASEAN +3 terhadap dukungannya kepada Indonesia ini adalah untuk pertama kalinya, walau sebenarnya merupakan penegasan kembali pernyataan yang sudah dibuat oleh masing-masing negara," kata Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri Hasan Wirajuda, yang dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN +3(Jepang, Korea Selatan, cina) itu menjadi utusan khusus menggantikan menteri Luar Negeri Alwi shihab yang berada di Surabaya untuk Kongres Kebangkitan Bangsa (PKB).¹¹ Pertemuan menlu itu merupakan kelanjutan dari pertemuan puncak para

¹⁰ Dikutip dari Ikrar Nusa Bhakti "Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keutuhan ASEAN Sebagai Lembaga Kerjasama Regional." Analisis CSIS, No. 4. Tahun 1998

¹¹ Kompas, 27 Juli, 2000.Hal.55

mencegah timbulnya perselisihan, tetapi kecuali terjadi perselisihan masing-masing harus menahan diri dari menggunakan kekerasan atau ancaman.

Beberapa hal diatas dapat dikatakan bahwa negara-negara ASEAN tidak akan mendukung gerakan separatisme yang berkembang di Indonesia.¹² Berdasarkan uraian diatas, maka berbagai fenomena atau gejolak yang masih terjadi di Aceh hingga kini yang meliputi : gerakan separatis atau Gerakan Aceh Merdeka serta tuntutan lainnya seperti referendum akan berpengaruh bagi stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi nasional serta stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara, terutama bagi negara-negara ASEAN.

Pemerintah telah menawarkan berbagai alternatif proses penyelesaian mengenai masalah Aceh (GAM), akan tetapi eksistensi GAM ini belum bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia. Dan walaupun pemerintah telah melakukan jeda kemanusiaan dan perjanjian dengan pihak GAM di genewa, tetapi masih ada saja pelanggaran dan tiap hari ada saja yang terbunuh. Ini membuktikan bahwa cara penyelesaian yang ditawarkan pemerintah kepada kelompok GAM belum sepenuhnya dapat di terima oleh pihak GAM. Bagi GAM referendum adalah harga mati untuk penyelesaian masalah Aceh (GAM).

Berlarut-larutnya masalah Aceh ini akan dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, apabila pemerintah RI tidak segera mencari solusi dalam masalah Aceh karena masalah ini berpengaruh bagi ketidakstabilan negara-tetangga indonesia dan memberi peluang bagi masuknya intervensi asing. Tanpa mengesampingkan peran ASEAN dalam penataan keamanan regional tetap dianggap penting mengingat tatanan keamanan regional yang hingga kini masih ditentukan oleh faktor kekuatan negara-negara yang memiliki kekuatan besar dan mempunyai pengaruh yang besar pula dalam masalah keamanan inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan Judul: **Pengaruh Gerakan Aceh Merdeka Terhadap Stabilitas Kawasan Asia Tenggara.**

¹² Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. Jakarta, 2000. Hal 8-10

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan perlu dilakukan agar penulisan terhindar dari kekaburan, mempunyai tingkat akurasi yang memadai dan mempersempit permasalahan dalam penulisan.

“Koentjoroningrat mengatakan bahwa pada umumnya pembahasan dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan antara lain :

1. Maksud dan perhatian penulis
2. Bahan yang ada mengenai masalah yang bersangkutan
3. Rumitnya anggapan -anggapan dasar atau asumsi yang ada yang dirumuskan
4. Penelitian lapangan yang sudah dilakukan.¹³

Dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan materi menjadi dua yaitu:

1. Batasan Materi

Yaitu mengenai Pengaruh Gerakan Aceh Merdeka terhadap Stabilitas Kawasan Asia Tenggara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah Aceh, akan tetapi eksistensi GAM belum bisa dapat diatasi. Berlarut-larutnya masalah Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia berimplikasi terhadap keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Masalah seperti separatisme ini telah mengarah pada disintegrasi bangsa dan dapat saja ditiru oleh negara-negara lainnya di kawasan ASEAN, karena Indonesia mempunyai karakteristik yang heterogen, baik secara etnis maupun agama, sehingga hal ini memungkinkan negara-negara tetangga Indonesia meniru dan dapat membuka peluang masuknya intervensi asing di Indonesia, apabila masalah Aceh ini berkembang, sehingga kawasan ASEAN terjerumus kedalam ketidakstabilan keamanannya.

2. Batasan Waktu

Pembatasan waktu dalam karya tulis ini dimulai sejak bergulirnya era reformasi atau setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang tepatnya tanggal 21 Mei 1998 dan diakhiri pada Juni 2002. Di batasinya penulisan ini karena puncak

¹³ Koentjoroningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta, 1985. Hal.29

tuntutan dari kelompok GAM semakin kuat dan bahkan eksistensi GAM ternyata masih sulit dipatahkan pemerintah Indonesia. Dan hal ini membawa pengaruh pada ketidakstabilan kawasan Asia Tenggara.

1.3 Permasalahan

Permasalahan merupakan faktor penting yang harus dipikirkan sebelum memulai suatu penelitian, karena suatu penelitian selalu berpangkal pada perumusan masalah.

Menurut Minarno Surachmad "Problematika" adalah Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita berjalan terus".¹⁴

Berdasarkan definisi diatas, penulis mengajukan Perumusan permasalahan sebagai berikut: *Bagaimana Pengaruh Gerakan Aceh Merdeka terhadap Stabilitas Kawasan Asia Tenggara?*

1.4. Kerangka Dasar Teori

Sebagai pedoman bertindak dalam mengumpulkan data serta pesan penulis, maka penggunaan teori sangatlah penting dalam kegiatan Ilmiah. Teori dapat digunakan sebagai landasan berpijak untuk memecahkan dan menganalisis permasalahan yang penulis ajukan.

Menurut Jack Plano Teori secara umum sebagai berikut:

"Suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam pengetahuan empiris teori mengacu pada kaitan logis pada perangkat proporsi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel, dengan menjelaskan atau meramalkan keduanya".¹⁵

¹⁴ Minarno Surachmad. *Dasar dan Teknik Riset, Pengembangan Metodologi Ilmiah*. CV. Tarsito, Bandung. 1970,hal 13

¹⁵ Jack S. Plano, *Kamus Analisa Politik*, PT. Rajawali, 1987,hal. 58

Jadi jelaslah bahwa dasar pandangan teori memegang peranana penting dalam setiap penulisan ilmiah, karena teori merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan suatu fenomena yang kita amati. Disamping itu teori berfungsi untuk membimbing jalannya suatu penelitian yang kita lakukan. Untuk menilik kembali apa yang terjadi dia Aceh hingga saat ini, khususnya pengaruh GAM terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara, disini penulis ingin menggunakan *teori konflik* sebagai upaya menganalisis pengaruh GAM terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara

Menurut David E. Apter konflik adalah:

Teorisasi konflik dari Mark hingga George Simmel menganggap konflik sebagai landasan motivasi perdebatan dan persaingan yang merupakan batu landasan kehidupan sosial.¹⁶

Sehubungan dengan terjadinya konflik, Cobb, dan Eider mengatakan bahwa "Konflik timbul bilamana orang menyadari akan kepentingan yang saling berbeda, sedangkan tujuan yang berbeda akan memotivasi orang-orang untuk menciptakan masalah. Masalah itulah yang kemudian menjadi isu yang akan membentuk basis konflik.)"¹⁷ Gerakan Separatisme atau tuntutan merdeka dari GAM serta keinginan untuk menerapkan syariat Islam ini pada akhirnya akan membentuk basis konflik, walaupun sebenarnya permasalahan di Aceh telah muncul kembali setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Kini tuntutan itu tidak hanya untuk menuntut hak istimewa melainkan lepas dari NKRI. Jika pemerintah lamban atau kurang tanggap dalam menangani persoalan yang kini terjadi di Aceh, papua serta daerah yang rawan konflik lainnya maka, disintegrasi bangsa di Indonesia akan terjadi. Tentu saja hal ini juga akan berpengaruh pada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri terancam, serta akan berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan ASEAN dan citra Indonesia di dunia Internasional.

¹⁶ David E. Apter, *Kamus Analisa Politik*, LP3ES, 1987, hal.322

¹⁷ Cobb and Eider, dalam Lan Craib, *Teori-teori Sosial Modern*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal.25

Disini penulis juga akan menggunakan konsep “*Regional Resilience*” dan konsep” *ketahanan nasional*.” Supaya memperjelas pemahaman tentang permasalahan yang terjadi di Aceh, konsep *regional resilience* ini ditujukan pada lingkungan eksternal dan menjadi dasar kerjasama keamanan ASEAN. Sedangkan konsep *ketahanan nasional* di implementasikan dalam kebijakan pertahanan setiap negara yang menjadi wewenang penuh negara tersebut, artinya persoalan-persoalan dalam negara sepenuhnya menjadi wilayah kedaulatan suatu negara.

Ketahanan regional dalam suatu kawasan sangat ditentukan oleh pola intraksi antar negara dikawasan tersebut yang didasari pada adanya ketahanan nasional.¹⁸ Untuk mewujudkan keadaan tersebut setiap negara harus mengkoordinasikan kebijakan dan perilaku mereka agar tidak bertentangan dengan negara lain. Sedangkan konsep “*ketahanan nasional*” telah dipraktikkan hampir di semua negara ASEAN seperti di Indonesia yang telah memformalkan konsep ini tahun 1973 kemudian di susul oleh Singapura yang menerapkan konsep ini dengan dikombinasikan dengan prinsip identitas nasional, kesatuan internal serta pembangunan.

Upaya untuk membentuk ketahanan nasional, peranan ASEAN hanya sebagai fasilitator informal dimana para pemimpin negara-negara anggota dapat bertukar pikiran mengenai cara penyelesaian masalah kawasan ketahanan nasional dengan ketahanan regional mempunyai hubungan yang erat seperti yang Yusuf Wanadi dianalogkan dengan “sebuah mata rantai, jika masing-masing negara ASEAN dapat mengatasi ancaman domestik maka akan dihasilkan dengan sendirinya ketahanan regional”. Dengan sebuah mata rantai akan mendapat seluruh kekuatannya dan seluruh kekuatan mata rantai, artinya ketahanan akan menciptakan keamanan regional yang tangguh di Asia Tenggara, asalkan negara-negara tersebut bersifat kooperatif.

¹⁸ Dewi fortuna Anwar, *Negara-negara ASEAN Mencari Model Keamanan Regional*, Analisis CSIS, No. 4, tahun. 1993, hal . 320-321

Disini penulis juga akan menggunakan konsep “*Regional Resilience*” dan konsep” *ketahanan nasional*.” Supaya memperjelas pemahaman tentang permasalahan yang terjadi di Aceh, konsep *regional resilience* ini ditujukan pada lingkungan eksternal dan menjadi dasar kerjasama keamanan ASEAN. Sedangkan konsep *ketahanan nasional* di implementasikan dalam kebijakan pertahanan setiap negara yang menjadi wewenang penuh negara tersebut, artinya persoalan-persoalan dalam negara sepenuhnya menjadi wilayah kedaulatan suatu negara.

Ketahanan regional dalam suatu kawasan sangat ditentukan oleh pola intraksi antar negara dikawasan tersebut yang didasari pada adanya ketahanan nasional.¹⁸ Untuk mewujudkan keadaan tersebut setiap negara harus mengkoordinasikan kebijakan dan perilaku mereka agar tidak bertentangan dengan negara lain. Sedangkan konsep “*ketahanan nasional*” telah dipraktikkan hampir di semua negara ASEAN seperti di Indonesia yang telah memformalkan konsep ini tahun 1973 kemudian di susul oleh Singapura yang menerapkan konsep ini dengan dikombinasikan dengan prinsip identitas nasional, kesatuan internal serta pembangunan.

Upaya untuk membentuk ketahanan nasional, peranan ASEAN hanya sebagai fasilitator informal dimana para pemimpin negara-negara anggota dapat bertukar pikiran mengenai cara penyelesaian masalah kawasan ketahanan nasional dengan ketahanan regional mempunyai hubungan yang erat seperti yang Yusuf Wanadi dianalogkan dengan “sebuah mata rantai, jika masing-masing negara ASEAN dapat mengatasi ancaman domestik maka akan dihasilkan dengan sendirinya ketahanan regional”. Dengan sebuah mata rantai akan mendapat seluruh kekuatannya dan seluruh kekuatan mata rantai, artinya ketahanan akan menciptakan keamanan regional yang tangguh di Asia Tenggara, asalkan negara-negara tersebut bersifat kooperatif.

¹⁸ Dewi fortuna Anwar, *Negara-negara ASEAN Mencari Model Keamanan Regional*, Analisis CSIS, No. 4, tahun. 1993, hal . 320-321

1.5. Hipotesis

Untuk menjawab problematika yang telah diajukan maka diperlukan suatu hipotesis, menurut Sutrisno Hadi¹⁹ hipotesis adalah:

“Dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah, dia akan ditolak kalau salah satu palsu dan akan diterima jika fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesa dengan begitu tergantung kepada hasil-hasil penyelidikan terhadap faktor-faktor yang dikumpulkannya.¹⁹”

Dengan demikian hipotesis bersifat sementara yang masih memerlukan verifikasi secara empirik. ini dilakukan dengan menguji sejauh mana ketetapan kualitas variabel-variabel yang terdapat dalam rumusan kesimpulan hipotesis yang diajukan.

Dalam tulisan ini berangkat dari teori dan data-data yang terkumpul maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan keamanan di kawasan Asia Tenggara, karena separatisme GAM yang telah mengarah kepada disintegrasi bangsa dapat merembet ke negara tetangga Indonesia dan dapat memberi peluang bagi masuknya intervensi asing apabila masalah ini berkembang, sehingga ASEAN akan terjerumus kedalam ketidakstabilan keamanannya mengingat negara-negara ASEAN memiliki karakteristik yang sama yaitu heterogen baik etnis maupun agama”

1.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan metode observasi tidak langsung yaitu melalui studi pustaka. Data-data yang berhasil penulis kumpulkan tidak hanya terbatas pada buku literatur saja, tetapi melalui surat kabar dan majalah. Untuk keperluan ini penulis mengunjungi perpustakaan sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Perpustakaan Fisip Universitas Jember

¹⁹ Sutrisno hadi, op.cit, hal. 79

3. Perpustakaan Centre Strategic For International Study
4. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1.6.1. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data-data tersebut, maka penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Menurut Mochtar Mas'oeed "*Metode deduktif*" adalah "Menarik prinsip-prinsip umum dengan menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah sehingga sesudahnya kita bisa menguji masing-masing proposisi dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus itu bisa dijelaskan dan diramalkan dengan teori yang sudah ditetapkan".²⁰ Dengan kata lain secara umum dapat disimpulkan bahwa *metode deduktif* adalah menyimpulkan hubungan yang sebelumnya tidak nampak berdasarkan generalisasi yang telah ada.

1.6.2. Metode Pendekatan

Setiap usaha pemecahan masalah akan mempergunakan alat untuk mencapai kebenaran secara ilmiah, oleh karena itu diperlukan metode-metode pendekatan yang sesuai, sehingga akan dapat gambaran yang obyektif, selaras dengan penulisan skripsi ini. Metode pendekatan merupakan tahapan-tahapan kerja yang berurutan satu sama lain dan saling bergantung. Tahapan pertama merupakan prasyarat bagi tahapan berikutnya, begitu juga seterusnya.

Sejalan dengan uraian diatas, maka metode penelitian akan bersangkut paut dengan segala langkah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang memadai terhadap permasalahan yang diteliti sebagaimana dikatakan oleh "The Liang Gie" bahwa metode adalah: Cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pula untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala-gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut.²¹

²⁰ Mochtar Mas'oeed, op.cit, hal. 80

²¹ The Liang Gie, dalam *Ilmu Politik, Pengertian, Kedudukan, Lingkup, dan Metodologi*, CV. Tarsito, Bandung, 1984, hal.23

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan *political- history*. Menurut Charless Eisenmenn *political history is thecronological discription of political fact on every kind, wether institutional or non institutional in life or state (or political society) concidered separately (internal policy) or in the relation between several state.*²²

Politik dan sejarah mempunyai kaitan yang sangat erat, kedudukannya selalu mempengaruhi dan melengkapi untuk perkembangan kedua unsur tersebut. Segala peristiwa politik dipengaruhi oleh proyeksi sejarah baik dalam hubungan sejarah masa kini maupun masa depan yang tidak terlepas dari situasi masa lalu sejalan dengan berjalannya waktu.

Tuntutan merdeka dari pihak GAM ini sudah ada sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Gerakan Aceh Merdeka ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu dan juga tidak lepas dari keadaan politik dulu, kini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, untuk menelaah masalah ini Penulis menggunakan pendekatan *sejarah - politik*.

Disamping itu, penulis juga menggunakan pendekatan *Collective Security* (keamanan bersama) untuk meneliti pengaruh Gerakan Aceh Merdeka terhadap stabilitas kawasan ASEAN, karena masalah GAM yang merupakan masalah internal suatu negara dan berpengaruh pada ketidakstabilan bagi negara lain. GAM ini merupakan masalah internal suatu negara akan tetapi dapat berpengaruh bagi ASEAN dan negara anggota di kawasannya.

Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan komitmen ASEAN yaitu suatu kawasan yang stabil, damai dan bebas dari campur tangan asing. ASEAN merasa terancam akan kestabilannya dengan adanya GAM ini, karena masalah ini menjadi suatu hambatan utama untuk mewujudkan keamanan di Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Untuk mengantisipasi ancaman-ancaman negara-negara anggotanya, maka ASEAN menyarankan Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah Aceh dengan diplomasi dengan negara-negara lain.

²² Charless Eisenmenn, *The Liang Gie, Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, 1994, hal. 87

Collective Security ini lebih terfokus pada *Common Security*. Adapun yang dimaksud dengan "*Common Security*" adalah suatu komitmen untuk hidup bersama, mengkhawatirkan keamanan para anggota lainnya, dan bekerja secara kooperatif dalam berbagai cara untuk memaksimalkan tingkat ketergantungan diantara bangsa-bangsa, dengan kata lain keamanan bersama ditunjukkan untuk mencapai keamanan dengan para anggotanya.²³

Keamanan kawasan harus ditata dan ditentukan oleh negara-negara dalam kawasan itu sendiri sebagai pemegang kendali utama dalam sebuah wadah kerjasama multilateral berdasarkan konsep *Collective Security* atau *Common Security*. Mengingat masalah (GAM) di Aceh ini dapat mempengaruhi stabilitas keamanan negara-negara di kawasan ASEAN, maka pendekatan *Collective Security* ini dapat di pakai dalam menganalisa pengaruh Gerakan Aceh Merdeka terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.²⁴

Masalah internal negara anggota dalam suatu kawasan juga menjadi masalah bagi ketidakstabilan dalam kawasan tersebut. Komitmen ASEAN terhadap lingkungan hidup negara-negarannya merupakan pendekatan keamanan yang paling penting, terutama bagi keamanan regionalnya dan kesempatan untuk menjalankan pembangunan ekonominya.

²³ Ikrar Nusa Bhakti, *Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di Asia Pasifik*, dalam Jurnal Ilmu Politik, No. 16, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal.60.

²⁴ Analisis CSIS, Tahun XXII, No. 4 Juli- Agustus 1997



BAB II

GAMBARAN UMUM KEADAAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

2.1 Daerah Istimewa Aceh

2.1.1. Identifikasi Daerah Istimewa Aceh

Daerah Istimewa Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sumatra, sehingga posisi geografisnya menjorok ke barat Laut Nusantara. Propinsi ini di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Batas sebelah utara adalah Laut Andaman yang mempertemukan Samudra Indonesia dengan Selat Malaka. Diseberang Laut Andaman ini terletak negara Burma dan Thailand. Batas wilayah sebelah selatan adalah Propinsi Sumatra Utara.¹ Dengan demikian Aceh berada pada salah satu jalur ekonomi yang paling strategis di dunia.

Propinsi daerah Istimewa Aceh memiliki Luas wilayah daratan sebesar 55.390 km² atau 2,88% dari luas Indonesia secara keseluruhan. Aceh berada pada garis Khatulistiwa antara 2⁰ Lu-6⁰ Lu dan 95⁰ Bu-98⁰ Bujur Timur.² Secara Administratif Propinsi Aceh terbagi menjadi 20 daerah tingkat II yang terdiri dari 8 Kabupaten, 8 Kotamadya Sabang, Kotamadya Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan.³ Aceh terdiri dari beberapa Pulau besar dan kecil. Disamping Pula We, terdapat sederet Pulau lain didekatnya, seperti Pulau Breueh, Pulau Beras, Pulau Nasi, dan beberapa Pulau kecil lainnya. Disebelah barat Aceh terdapat sekelompok Pulau yang terdiri dari Pulau Simeulu, Pulau Tuangku, Pulau Batu dan lain-lain.

Daerah Aceh dilingkari oleh Lautan Indonesia, sedangkan bagian utara dan timur dilingkari oleh Selat Sumatra (Selat Malaka) dan bagian selatan berbatasan dengan Sumatra Utara. Letak daerah Aceh yang membujur dari utara

¹ Sadya, ~ *Kumpulan Ilmu Politik yang Lengkap dan Jelas (Kilas)*. PT. Tirta Inti Prima Sejati, Jakarta 1996, Hal.76

² Ibid, hal.77

³ Ibid, hal. 78

keselatan dibelah oleh Bukit Barisan menjadi dua bagian. Sebelah barat dari pegunungan itu merupakan daerah yang sempit dengan hutan yang lebat. Sedangkan pegunungan dan gunung yang tinggi berada dibagian tengah dan merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan di Sumatra.

Mengenai jumlah penduduk di Aceh, pada tahun 1977, penduduk Aceh berjumlah 2.346.784 jiwa, dengan perincian 1.186.249 jiwa, dengan jumlah tingkat laju pertumbuhan penduduk di daerah istimewa Aceh semenjak tahun 1920 berbeda-beda menurut periode. Berdasarkan data yang diperoleh pada Lembaga Demografi Fakultas ekonomi Universitas Syiah Kuala tingkat laju pertumbuhan penduduk Aceh semenjak tahun 19920 adalah sebagai berikut: 3,3% dalam periode 1920-1930, periode 1930-1961, 1,6%, dan periode 1961-1971 2,1%, periode 1971 sebanyak 2,3%. Bila kita perhatikan, bahwa penduduk Aceh di kabupaten yang terletak di pesisir pantai selat Malaka, termasuk Kotamadya Banda Aceh, Aceh Besar, kelihatan agak jarang penduduknya bila kita bandingkan dengan kabupaten yang terletak di Lautan Hindia.

Kabupaten yang terletak dipesisir Selat Malaka kepadatan penduduknya melebihi 60 juta jiwa per km^2 kecuali Aceh Timur yang hanya 47,49 juta jiwa per km^2 . Dan di kabupaten di pesisir Lautan Hindia kepadatan penduduk mencapai 20 juta per km^2 . Sedangkan di kabupaten Gayo dan Alas tak melebihi 20 juta jiwa per km^2 . Secara umum penduduk Aceh relatif jarang, tetapi tidak erarti secara nyata memang penduduknya benar-benar jarang. Hal ini merupakan problem pemerintah, karena pola perkembangan hanya berpusat di daerah tertentu, sehingga mengakibatkan mereka hidup berdesakan pada daerah tertentu saja.

Masyarakat adat Aceh memiliki bahasa pergaulan atau bahasa pengantar. Tiap-tiap bahasa pergaulan yang diucapkan oleh masing-masing adat, dan masing-masing adat memiliki intonasi atau dialek, antara beberapa tempat yang diperlihatkan pada setiap bahasa pergaulan, ini erat hubungannya dengan keadaan giografi dan faktor interaksi yang berlangsung antara beberapa kelompok masyarakat penduduk bahasa di suatu tempat. Perlu diketahui juga bahwa perbedaan dialek antara satu tempat dengan tempat lain di dalam suatu bahasa tidak membawa pengaruh pada tingkat sosial (Social Level in Language).

Adapun bahasa yang ada di masing-masing daerah adalah : dialek Pesisir barat, dialek Aceh besar, dialek Pidie, dialek Aceh Utara. Mengenai kepercayaan, masyarakat aceh tidak mengenal adanya dewa-dewa, karena masyarakat Aceh memeluk agama Islam. Agama lain seperti Hindu, Kristen, Budha, hanya berkembang terbatas di kalangan pendatang. Sesungguhnya kepercayaan yang di yakini dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan satu-satunya kepercayaan masyarakat di Aceh, mengingat Islam sebagai agama Monotheisme, namun semua masyarakat Aceh juga percaya bahwa Tuhan menciptakan makhluk halus dan makhluk ini mendiami alam Ghaib.⁴

2.1.2. Sejarah singkat terbentuknya Daerah Istimewa Aceh

Aceh dikenal sebagai sebuah propinsi yang mempunyai predikat Istimewa. Aceh diistimewakan dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Oleh karena itu pemerintah pusat Aceh diberi hak untuk memakai nama Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan keputusan Perdana Menteri No.1\ MISSI\59.⁵ Aceh adalah Propinsi Kesultanan yang dimulai dengan berdirinya kerajaan Islam pada tahun 1514, terletak di ujung Utara Pulau Sumatra. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah. Pada Tahun 1521 wilayahnya diperluas sampai ke Pidie, tahun 1524 ke Pasai dan Aru, kemudian menyusul Perlak, Tamiang, Lamuri.

Pada tahun 1521 Kesultanan Aceh yang juga disebut dengan Aceh Darussalam diserang oleh Armada Portugis yang di pimpin oleh Jorge D. Brito, tetapi dapat dikalahkan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada 5 Agustus 1530. Kesultanan Aceh sepeninggal Ali Mughayat Syah diperintah oleh Putra Sulungnya, Sultan Salahudin. Sultan Salahudin bersikap lunak dan memberi peluang kepada misionaris Portugis untuk bekerja ditengah-tengah orang Batak di pantai timur Sumatra. Ia juga dipandang kurang memperhatikan masalah pemerintahan. Sultan Salahudin kemudian digantikan oleh saudaranya, Sultan Alaudin Al-Qahar pada tahun 1538. Pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Al-

⁴ Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh. Proyek Penelitian dan Pendataan Pemberdayaan Daerah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal.19-20

⁵ T. Ibrahim(at.al). Adat dan Istiadat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Proyek Penelitian dan Pendataan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh. Hal.12-13

Qahar, kesultanan Aceh menyerang Malaka sebanyak dua kali, tahun 1547 dan 1568. Pada masa pemerintahan Sultan ini, Aceh mengalami kemajuan pesat. Sultan Al-Qahar Wafat pada 28 September 1571.

Sepeninggal Qahar, kesultanan Aceh dilanda kemelut berlarut-larut akibat perebutan kekuasaan. Kesultanan Aceh menjadi stabil kembali setelah Sultan Alaudin RI, Ayat Syah Sya'id Al-Mukammal naik tahta pada tahun 1589 dan memerintah sampai 1604. Setelah itu Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Ali RI, Ayat Syah (April 1604-April 1607), kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Muda (1607- 1636). Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran, Aceh memperluas wilayahnya ke arah selatan dan memperoleh kemajuan dibidang ekonomi melalui sistem monopoli perdagangan dipesisir Sumatra Barat dan Indrapura. Aceh menjadikan Pariaman sebagai Bandar terpenting bagi perdagangan dipesisir Sumatra Barat.

Pada tanggal 2 November 1871 dibuat perjanjian baru, Traktat Sumatra, antara Belanda dengan Inggris yang sekaligus membatalkan perjanjian (Traktat) London. Perjanjian baru ini mempunyai kebebasan bagi Inggris untuk mengembangkan kekuasaannya di Malaya, sedangkan Belanda memperluas kekuasaannya di Sumatra. Dengan alasan ini Belanda kemudian menyerbu Ibu kota kesultanan Aceh pada 1873, menduduki Banda Aceh dan kota-kota Pantai lainnya. Pada bulan Januari 1874, Istana Kesultanan Aceh dapat direbut oleh Belanda, namun Sultan Mahmud Mughayat Syah yang pada waktu itu menjabat sebagai Sultan Aceh dapat meloloskan diri bersama panglima Polem.

Pada tahun 1874, Belanda menyatukan Aceh dan daerah taklukannya menjadi milik Pemerintahan Hindia Belanda. Namun meskipun Kesultanan Aceh dihapuskan oleh Belanda, rakyat Aceh masih mempunyai seorang Sultan, yaitu Sultan Muhammad Daud Syah yang dinobatkan pada 1878. Ia kemudian ditangkap oleh Belanda pada 1803 dan dibuang ke Ambon pada 1807 kemudian wafat 1939.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya daerah Aceh dianggap sebagai daerah tempat pertama kali masuknya agama Islam dan tempat berdirinya Kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu di Pasai dan Peureulak sekitar abad

ke-13. Pengaruh agama dan kebudayaan yang begitu besar menyebabkan Aceh mendapat julukan sebagai *Seuramoe Mekah* (serambi mekah). Perpaduan antara agama dan adat telah mengikat rakyat Aceh kedalam suatu ikatan yang amat kuat. Perpaduan ini telah melahirkan pedoman hidup dalam bentuk peribahasa Aceh, yang berlaku sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad 17, yaitu “*Hukom ngon adat, lagee Zaat ngon Sifeut*”, yang berarti “*Hukum dengan adat, sebagai zat dengan sifatnya.*” Hukum disini maksudnya hukum agama yang mempunyai hubungan yang erat sekali dengan adat.⁶

2.1.3. Latar Belakang Kebudayaan

Latar Belakang sejarah, seperti bagian Indonesia lainnya daerah Aceh juga telah lama didiami oleh manusia. Hal ini dapat diamati apabila diamati letak geografis daerah Aceh yang relatif menguntungkan dalam hubungan interaksi antara dua pusat peradaban kuno, yaitu India dan Tiongkok. Tentu saja sedikit banyak unsur peradaban dan kebudayaan dari kedua kebudayaan itu ikut menyerap kedalam pelbagai segi kehidupan penduduk Aceh pada waktu itu.

Letak strategis inilah barangkali agama Islam masuk dan menyebar kekepulauan Indonesia, dan Aceh merupakan yang mula-mula dimasukinya. Pemberian gelar *Serambi Mekah* (*Seuramo Meukah*) sekurang-kurangnya memberi gambaran betapa arti Aceh dalam hubungannya dengan penyebaran agama Islam di kepulauan Indonesia. Kendatipun dan kapan waktu yang pasti masuknya Islam ke Indonesia masih menjadi persoalan, namun toh kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah di Samudra Pasai dan Perlak (50-51). Berdirinya Negara Islam Pasai dan Perlak sekitar abad ke-13 telah memberi membentuk kepada azas perkembangan adat dan upacara perkawinan di Aceh yang diwarnai sepenuhnya oleh ajaran Islam yang dikembangkan oleh kedua kerajaan itu. Tata krama pergaulan suami istri mulai diatur menurut ajaran Islam, sesuai dengan Hadist Nabi Besar Muhammad saw.

Aturan adat dan agama mulai dikembangkan diseluruh Aceh setelah abad ke 16, yaitu setelah adanya usaha perluasan teritorial dengan mempersatukan

⁶ Ibid. hal. 15-17

daerah-daerah kerajaan kecil menjadi kerajaan Aceh Darussalam. Usaha penyatuan ini di rintis oleh Sultan Mughayat Syah (1520-1530). Usaha perluasan teritorial diteruskan oleh para penggantinya, terutama pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Teritorial Kerajaan Aceh Darussalam bukan saja meliputi daerah istimewa Aceh, tetapi menjangkau sampai pesisir Barat dan Timur Pulau Sumatra, hingga meliputi sebagian Semenanjung Malaka (49161-77).

Terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17, telah memberi harapan baru bagi perkembangan adat dan upacara perkawinan diseluruh daerah Aceh, yang bernafaskan Islam itu. Ungkapan ini tertulis dalam kata-kata "adat ngon hukom agee zat ngon sifeuet", maksudnya adat dengan hukum (Islam) seperti zat dengan sifat. Pada masa itu digariskan pula pembagian kekuasaan atas hukum agama, adat dan kebiasaan. Hal ini sehubungan dengan ungkapan yang berkembang sejak masa itu.

"Adat bak po teumeureuhom, hukum bak syiah kuala". Kanun bak putroe phang, reusam bak laksamana." Maksudnya adalah, adat pada po teumeureuhom (Sultan Iskandar Muda), hukum pada Syah Kuala (Ulama), kaum pada putri pahang, reusam pada laksamana (Panglima). Pada waktu permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda kelihatan bahwa wilayah Aceh tidak saja merupakan satu kesatuan administratif, tetapi juga berbentuk satu kesatuan adat istiadat. Namun kemudian dalam rangka kemajuan-kemajuan yang diperoleh dibidang memori melalui penjualan lada, menyebabkan perluasan areal tanaman lada kepantai barat dan timur. Dibagian barat atau ranto dua blaih, kelompok etnis Aceh bertemu dengan kelompok etnis Minangkabau, sehingga menyebabkan terbentuknya adat Aneuk Jamee.

Demikian juga ke Pantai timur yaitu daerah tamiang, kelompok etnis Aceh bertemu dengan etnis Melayu, sehingga timbul percampuran kebudayaan yang tercermin dalam adat Tamiang. Keadaan ini berlaku untuk daerah Gayo dan Alas, meskipun frekwensi percampuran itu tidak demikian tinggi kadarnya. Persoalan ini didasarkan kepada hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa semua belah bukit, belah cik, merangkap cikal bakalnya keturunan Aceh, dan belah bukit berasal dari keturunan Batak.

Kedua belah tersebut memperlihatkan perbedaan bahasa dan dialek. Perbedaan bahasa dan dialek ini tidak lagi bersifat fundamental, karena telah terjadi percampuran begitu jauh antara kedua belah tersebut. Demikianlah sebagian besar proses terbentuknya kelompok etnis di Aceh. Hingga sekarang kelompok etnis tersebut telah membentuk adat istiadatnya masing-masing : didalam propinsi daerah istimewa Aceh.

Memang kelihatan bahwa antara adat istiadat dengan agama Islam di daerah Aceh telah terjalin dalam pelbagai segi kehidupan masyarakat, sehingga antara adat dan agama menyerupai dua hal yang sukar dipisahkan. Hal ini terlukis dalam ungkapan “ *Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeuel*” maksudnya adat dengan hukum (Islam) seperti zat dengan sifat . Ungkapan ini berhubungan dalam setiap periodisasi sejarah sampai sekarang kalau kita tinjau lebih lanjut keadaan Aceh setelah mangkatnya Sultan Iskandar Muda (1636), kerajaan Aceh Darussalam setelah itu boleh dikatakan mengalami masa kemunduran dan penyusutan dalam segala bidang kehidupan

Karena bersamaan dengan itu muncul dua bangsa Barat yang lain yaitu Belanda dan Inggris menggantikan kedudukan Portugis di kawasan Indonesia bagian barat. Persaingan yang berlangsung antara bangsawan di ibu kota kerajaan dalam memperebutkan tahta kerajaan, dipergunakan oleh kedua bangsa itu untuk menanamkan pengaruhnya di daerah taklukannya Aceh dipantai Barat dan Timur Sumatra, serta Semenanjung Malaka. Setelah satu perwujudannya, didudukinya Pesisir Sumatra Barat oleh Belanda pada bagian kedua abad ke-17(30,90,102).

Usaha Belanda untuk menduduki wilayah Aceh lebih besar dibandingkan dengan Bangsa Inggris. Sehingga usahanya itu telah mengalami masa perang melawan rakyat Aceh selama lebih kurang 40 tahun. Pendudukan Belanda atas wilayah kerajaan Aceh tidak membahayakan struktur adat secara keseluruhan., misalnya persatuan adat dalam bentuk upacara perkawinan di Aceh sama sekali tidak ada pengaruh Belanda (dalam bentuk kebudayaan barat). Tidak ada dari unsur upacara-upacara perkawinan yang mencontoh model perkawinan Belanda.⁷

⁷ Ibid, hal.2-7

2.2. Aceh Sebelum dan Setelah Indonesia Merdeka

Di Banda Aceh Pernah jaya sebuah kerajaan dengan sebutan kerajaan Aceh Darussalam . Kerajaan ini muncul seiring dengan meredupnya kejayaan Samudra Pasai yang terus di teror Portugis, sekitar abad ke-16. Bahkan Pengusaha Aceh Darussalam berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan Aceh di bawah panji- panjinya .

Aceh Darussalam maju pesat pada masa Pemerintahan Sultan Mughayat Syah (1511-1513) dan Sultan Al-Kahar (1539- 1571). Puncak kejayaannya dicapai pada masa Sultan Iskandar Muda Meukutu Alam (1606-1639) kal itu, Aceh Darussalam sangat maju dalam bidang pengembangan agama Islam, pendidikan, politik maupun perdagangan. Kerajaan ini menjadi salah satu dari lina kerajaan Islam terbesar di dunia, selain Istambul (Turki), Maroko, Isfahan (persatuan atau Iran), dan Maghol (India). Kebesaran Aceh Darussalam antara lain dibuktikan dengan pengakuan dari Syarif Mekah atas nama khalifah Islam di Turki, bahwa Aceh adalah “ pelindung kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Raja atau sultan-sultan di Nusantara pun mengakui sultan Aceh sebagai “ payung” mereka dalam menjalankan tugas kerajaan- kerajaan. Jamaah haji di Nusantara juga selalu singgah di Aceh , itulah sebab-sebabnya Aceh Darussalam dikenal pula dengan sebutan “ serambi mekah” , predikat yang masih melekat ini sampai saat ini ada. Orang Aceh waktu itu mampu memeluk agama Islam secara kaffah (menyeluruh), tidak bercampur baur dengan bid’ah dan khurafat adat kebiasaan animisme nenek moyang.

Gambaran pelaksanaan syariat Islam secara khaffah antara lain bisa dilihat dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh yang tidak pandang bulu. Alkisah, putra sultan Iskandar Muda bernama Meurueh Pupok terbukti berzina dengan salah seorang istri perwira. Padahal putra mahkota ini sudah beristri. Hukum kerajaan yang juga hukum Islam menggariskan bahwa pelaku semacam itu harus divonis hukuman rajam sampai mati. Mengingat posisi Meurueh sebagai putra raja yang kelak akan duduk disingasana, Qadi Malikul’ adil (Ketua Mahkamah Agung) Syeh Syamsudin assumatrani beserta para hakim agung datang menghadap sultan,

memohon agar beliau menggunakan hak istimewa “ guna mengampuni putranya” . Dengan tegas Sultan Iskandar Muda menolak seraya bertitah “ apa jadinya Aceh nanti kalau diperintah oleh seorang pezina dan pengganggu istri orang.”

Sultan lantas mengeluarkan kebijakan yang kemudian menjadi pegangan para hakim dalam melaksanakan tugas yaitu, “ *Matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat patoe tamita*” (meninggal anak ada pusarnya, hilang keadilan atau adat kemana hendak dicari). Sebagai wujud sikap konsistennya, sultan Iskandar Muda akhirnya merajam Meurueh Pupok hingga meninggal. Sultan begitu teguh memegang sabda rasulullah saw, yang berjanji akan tetap menegakkan hukum Islam, andaikan Fatimah melanggar sekalipun .

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Masjid Baiturrahman mengalami renovasi besar-besaran. Masjid yang berada di jantung kota Banda Aceh ini memang telah menjadi sentral kegiatan masyarakat saat itu. Tidak hanya dakwah dan ritual keagamaan, juga pusat pertemuan dan musyawarah, pendidikan dan berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan. Baiturrahman yang pertama kali berdiri tahun 1292 waktu itu hanya beratap rumbia, berlantai tanah, sehingga jamaah shalat harus menggelar tikar. Kini telah mempunyai Lembaga Perguruan terbesar di Asia Tenggara dengan berbagai disiplin Ilmu, ada yang menyebut perguruan itu sebagai Daerah Syaria’ah, ada pula yang menyebut sebagai jamia’ah Baiturrahman.

Para guru besarnya didatangkan dari Arab, para mahasiswa pun datang dari berbagai penjuru dunia. Kerajaan Aceh Darussalam turun pamornya di masa Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah (1874- 1903) . Selama kurang lebih 29 tahun energi dan perhatian raja ini terkuras untuk perang melawan Belanda . Pada tahun 1904 Belanda menyatakan perang Pasifikasi Aceh telah usai, tetapi pada hakikatnya perjuangan rakyat Aceh melawan kaphee(kafir) tidak pernah usai. Tahun 1918 Sultan akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Batavia hingga mangkat. Yang patut dicatat, sultan Alauddin tak pernah menyerahkan kedaulatan kerajaan kepada Belanda di Nusantara, Aceh inilah yang tak pernah takluk di bawah ketiak penjajah Belanda.

memohon agar beliau menggunakan hak istimewa “ guna mengampuni putranya” . Dengan tegas Sultan Iskandar Muda menolak seraya bertitah “ apa jadinya Aceh nanti kalau diperintah oleh seorang pezina dan pengganggu istri orang.”

Sultan lantas mengeluarkan kebijakan yang kemudian menjadi pegangan para hakim dalam melaksanakan tugas yaitu, “ *Matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat patoe tamita*” (meninggal anak ada pusarnya, hilang keadilan atau adat ke mana hendak dicari). Sebagai wujud sikap konsistennya, sultan Iskandar Muda akhirnya merajam Meurueh Pupok hingga meninggal. Sultan begitu teguh memegang sabda rasulullah saw, yang berjanji akan tetap menegakkan hukum Islam, andaikan Fatimah melanggar sekalipun .

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Masjid Baiturrahman mengalami renovasi besar-besaran. Masjid yang berada di jantung kota Banda Aceh ini memang telah menjadi sentral kegiatan masyarakat saat itu. Tidak hanya dakwah dan ritual keagamaan, juga pusat pertemuan dan musyawarah, pendidikan dan berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan. Baiturrahman yang pertama kali berdiri tahun 1292 waktu itu hanya beratap rumbia, berlantai tanah, sehingga jamaah shalat harus menggelar tikar. Kini telah mempunyai Lembaga Perguruan terbesar di Asia Tenggara dengan berbagai disiplin Ilmu, ada yang menyebut perguruan itu sebagai Daerah Syaria’ah, ada pula yang menyebut sebagai jamia’ah Baiturrahman.

Para guru besarnya didatangkan dari Arab, para mahasiswa pun datang dari berbagai penjuru dunia. Kerajaan Aceh Darussalam turun pamornya di masa Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah (1874- 1903) . Selama kurang lebih 29 tahun energi dan perhatian raja ini terkuras untuk perang melawan Belanda . Pada tahun 1904 Belanda menyatakan perang Pasifikasi Aceh telah usai, tetapi pada hakikatnya perjuangan rakyat Aceh melawan kaphee(kafir) tidak pernah usai. Tahun 1918 Sultan akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Batavia hingga mangkat. Yang patut dicatat, sultan Alauddin tak pernah menyerahkan kedaulatan kerajaan kepada Belanda di Nusantara, Aceh inilah yang tak pernah takluk di bawah ketiak penjajah Belanda.

Akibat Belanda pula pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Darussalam mengalami kehancuran. Pemerintah Kolonial lebih suka memberlakukan hukum barat (Taghut). Demikian pula dengan pemerintahan Jepang. Bahkan pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang oleh rakyat Aceh dianggap sebagai bangsa sendiri tidak mau mengembalikan syariat Islam yang selalu dirindukan itu. Pepatah "*Adat bak Potreumeu, reuhon, hukom bak syiah kuala*" (hukum adat ditangan pemerintah, hukum syaria'at ada di tangan ulama) pun bisa mengantung diawang-awang Belanda. Aceh yang saat ini terus diselimuti mendung. " kita telah kehilangan "ruh," demikian seorang khatib sholat juma'at di Masjid Baiturrahman beberapa saat lalu, meneriakkan ekspresi kegetiran hatinya. Tentu saja 'ruh' yang dimaksud adalah syariat Islam .

Dimasa Orde Lama, ulama Aceh pernah meminta agar ruh itu di kembalikan. Namun, pemerintahan rezim Soekarno menolak, maka terjadilah peristiwa berdarah 1953 saat tgg. Muhammad Daud Beurueh melaksanakan perlawanan untuk menuntut hak-hak rakyat Aceh yang terampas. Penolakan pemberlakuan syariat Islam juga dilakukan Orde Baru dibawah kendali Soeharto. Yang dikirimkan ke Aceh justru ribuan aparat keamanan-berupa kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989-1997- yang mengakibatkan hati rakyat Aceh makin menyala menahan amarah.

Setali tiga uang dengan itu adalah Orde reformasi, yang menurunkan pasukan pengendali rusuh massa (PPRM) setelah kebijakan massa dicabut . Luka Aceh pun semakin mengganggu , meski dikecam banyak pihak karena menerjunkan PPRM, Pemerintahan reformasi rupanya sedikit memberi angin segar bagi kehidupan beragama di Aceh. Hal itu disebabkan karena pemerintah mengeluarkan UU tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 4 Oktober 1999 lalu. Dimana dalam Undang-Undang ini Aceh di beri kebebasan melaksanakan syariat Islam. Sayangnya, akibat lambannya pemerintah menyelesaikan konflik Aceh, rakyat Aceh menuntut lebih dari itu , yaitu merdeka itulah yang kini diteriakkan 90% rakyat Aceh .⁸ Selama ini, kalau

⁸ Adat dan Upacara Perkawinan Daerah istimewa Aceh. Proyek Penelitian dan Pendataan Pemberdayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, hal. 20-22

orang menyebut Serambi Mekah, tidak lain adalah Aceh, karena dibumi Aceh itulah fajar Islam terbit pertama kali untuk kawasan Nusantara yang kemudian bernama Indonesia ini. Kerajaan Peurlak dan Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama di negeri kita . Dan disitu pernah lahir sufi bernama *Syeh Hamzah Fansuri dan Syeh Abdul rauf Singkel*. Telah berad- abad lalu suara azan dan Al-Qu'ran yang dibaca selalu terdengar setiap waktu, sehingga suaranya pun beraroma ayat-ayat allah .

Maka ketika Imperialis dan Kolonialis Belanda menginjakkan kaki di Aceh dan hendak mengeruk kekayaan Aceh, Aceh pun bergolak. Orang-orang Aceh bangkit untuk mempertahankan hak miliknya . Pecahlah perang Aceh 1873-1911. Semangat perang Aceh menurut sejarah, banyak ditimba dari sebuah kitab Syair berjudul “ *Hikayat Perang Sabil*”, karangan Cik Pantee Kulu. Dalam bukunya “ ketika kata ketika warna ”:antologi puisi dan lukisan 50 tahun Kemerdekaan RI dilukiskan isi sebagian dari Hikayat Perang Sabil tersebut , yang diantara baitnya, terjemahannya : Siapa sedia serahkan nyawa dan harta, Untuk biaya perang dijalan ilahi, Diberi aliah tinggi harganya harga surga tinggi tukarannya pasti.

Dengan wajah yang penuh semangat jihad itu, tidak mustahil pihak penjajah Belanda merasa kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Pahlawan-pahlawan Aceh bukan hanya dari kalangan laki-laki saja. Selain Tgk. Umar, dan Tgk. Cik di Tiro, tampil juga pahlawan wanita, seperti Tjut Meuthia, Tjut Nya'Dien dan tokoh-tokoh wanita lainnya yang tak kalah dahsyatnya dalam memimpin perang gerillinya nya.

Demikian juga setelah kemerdekaan . Dalam buku *Simak dan Selamatkan Aceh*, disebutkan bahwa setelah Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada empat orang ulama besar Aceh, yaitu, Teungku Djakfar Siddik Lamdjabat, Tgk.Hadji Hasa Kreungkale, Tgk. Hadji Ahmad Hasballah Indrapuri dan Tgk. Muhammad Daud Beurueh., yang mengeluarkan fatwa, bahwa berjuang untuk kemerdekaan Indonesia adalah termasuk fiisabillah . Bahkan pada Maret 1949, Tgk. Mansoer, yang menjabat wali Negara Sumatra Timur saat itu . Ketika mengajak Tgk.Daud Beurueh (Gubernur Militer Aceh) untuk mendirikan

negara sendiri, ajakan itu ditolak mentah-mentah rakyat Aceh dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh memilih bersatu dengan Republik Indonesia. Sejarah ini menjadi catatan penting untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Akhir-akhir ini Aceh telah menjadi porak- poranda, menurut media, sekitar seratus sekolah hancur menjadi puing, akibatnya sekitar 23.000 anak dari SD sampai SMU kesulitan untuk menuntut ilmu, belum lagi korban jiwa dari berbagai pihak. Dengan kenyataan yang memperihatinkan ini, jiwa yang sehat tentunya tidak membenarkan kalau kekacauan ini terus berlangsung berkepanjangan. Oleh karena itu pemerintah RI sangat di harapkan untuk secepat mungkin menyelesaikan masalah Aceh dengan penuh kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai kultural yang kita miliki.⁹

Kota yang kini disebut Banda Aceh itu sedang menjadi saksi penting berjalannya sejarah Aceh. Pemerintah Pusat memutuskan kembali kepada bentuk negara kesatuan dari bentuk serikat, pada 20 Agustus 1950. Indonesia hanya terbagi dalam 10 propinsi. Akibatnya, propinsi Aceh harus meleburkan dirinya ke Sumatera Utara, dengan ibu kota Medan.

Ketegangan segera memuncak di Aceh. Untuk itulah, Bung Hatta segera turun ke Kutaraja. Malam harinya, ia segera diterima dalam suatu pertemuan terbatas para pemimpin Aceh. Hadir antara lain Wakil residen Aceh, T.M. Amin, Bupati Aceh Zaini Backry, Wedana Mahmud Harun, serta Tgk. Muhammad Daud Beureueh, tokoh masyarakat Aceh yang sangat disegani dan sekaligus Gubernur Aceh. Pertemuan itu berlangsung amat emosional. Beberapa peserta sampai meneteskan air mata. Tgk.Daud Beureueh sendiri tak dapat lagi menahan perasaannya, sampai terlontar ucapan keras, maka untuk pertama kalinya, terjadi kekecewaan masyarakat Tanah Rencong itu ketika baru saja menghirup udara kemerdekaan. Beberapa kali tokoh Aceh hilir mudik ke Jakarta untuk melunakkan keputusan itu. “ Para delegasi ini diterima dengan pintu kamar terbuka, tetapi pintu hati mereka tertutup,” tulis Hasan Saleh, salah seorang pelaku sejarah, dalam bukunya “Mengapa Aceh Bergolak, 1992. Ketika itu, Aceh baru saja berada dalam pelukan Indonesia selama lima tahun. Tetapi, Serambi

⁹ Suara Hidayatullah, 8\ XII\ Desember 1999, hal.45

Mekah itu sudah gerah dan gelisah. apa boleh buat, sejak semula, sejarah peleburan Aceh kewilayah Indonesia memang tidak mulus. Rupanya, Aceh memang punya cara yang berbeda dalam menorehkan sejarahnya. Penuh ayunan senjata dan kobaran semangat perang. Jika jauh dirunut kebelakang, hobi berperang dan bertahan itu berawal sejak 1500-an. Kerajaan Aceh sudah berperang melawan penjajah Portugis dan Inggris ketika zaman Kolonialisme tiba. Setelah itu, Aceh mengayunkan senjata melawan Belanda. Kemudian tanpa istirahat, Aceh pun berperang melawan Jepang, 1943-1945.

Inilah yang membedakan Aceh dengan daerah lainnya . Perang Pangeran Di Ponogoro di Jawa Tengah berlangsung lima tahun, lalu habis. Aceh sanggup menghadapi Belanda selama 60 tahun. “ Aceh memang paling membanggakan heroismenya,” Kata Prof.Nazaruddin Syamsudin, Guru besar Universitas Indonesia yang setia mengamati perkembangan Aceh. Ketika sorak-sorai kemerdekaan Indonesia menggema, Aceh juga menyatakan kegembiraan dan meleburkan dirinya. pada tahun 1947, dalam kunjungannya ke Kutaraja , Presiden Soekarno menjanjikan bahwa Aceh bebas menjalankan Syariah Islam setelah perang Kemerdekaan usai. Tapi, bulan madu tak berlangsung lama. Pada 1953, Aceh bergolak melawan Republik.” Jadi cuma delapan tahun rakyat Aceh tidak berperang,” kata Nazruddin. Pada tahun itu, batas sabar Daud Beurueh rupanya sudah jebol. Ia merasa sudah berkali-kali dikecewakan pusat. Bentuk pemerintahan otonomi luas serta kebebasan menjalankan syariat Islam di Tanah Serambi Mekah, yang menjadi cita-citanya, banyak mendapat hambatan. Gagasan memberontak pun timbul. Apalagi Daud Beurueh sudah terpengaruh dengan Darul Islam\ Tentara Islam Indonesia(DIVII) pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Maka meletuslah pemberontakan Daud pada 21 September 1953. Daud menyatakan Aceh dan Kawasan sekitarnya sebagai bagian negara Islam Indonesia bentukan Kartosuwiryo. Sejak saat itu, ia bersama pasukannya turun naik gunung bergerilya melawan pemerintah sembilan tahun lamanya.

Pada Mei 1962, Daud Beurueh Akhirnya kembali kepangkuan ibu pertiwi. setelah dibujuk berkali-kali oleh pemerintah. Apalagi setelah, pada 26 Mei 1959, Aceh telah memperoleh status propinsinya kembali lengkap dengan embel-embel "Daerah Istimewa." Tetapi, Aceh tetap saja gelisah. Rupanya semangat untuk menentukan daerah sendiri tidak pernah padam. Sampai saat ini, kegelisahan itu masih menyisakan rasa ke Indonesiaan. Tetapi, sentimen merah Putih itu digulung ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di cetuskan, M. Hasan Tiro, di kampung halamannya, didesa Glee Saba, Tiro, kabupaten Pidie, pada 4 Desember 1976. Pemerintah lebih senang menyebut mereka GPK (gerakan pengacau keamanan).

Sejak itu aksi-aksi GAM menghiasi sejarah Aceh. Beberapa kali mereka bentrok dengan aparaturnya keamanan yang terus menekan. Korban pun berjatuhan dikedua pihak. Sang pemimpin sendiri lebih suka menyaksikan pemberontakannya dari luar negeri. Sampai awal 1990-an, pemerintah pernah memperkirakan, kekuatan GAM hanya mencapai 30 orang yang berkekuatan senjata. Tapi sumber lainnya menyebutkan, 1.000 simpatisan GAM telah selesai menjalani latihan militer di Libya. Kini, setelah pemerintahan Orde Baru, mereka meneriakkan "merdeka atau referendum" lebih leluasa dikumandangkan. GAM seakan mendapat angin buritan. Mereka bahkan mempunyai versi sejarah sendiri soal kedaulatan Aceh. Belanda konon, pernah menyatakan gencatan senjata dengan kerajaan Aceh. Jadi Aceh memang tidak pernah menyerah. Apalagi menyerahkan kedaulatannya. "Sejak dulu Aceh itu merdeka menurut mereka." Karena itu, kami tidak mengakui Indonesia-Jawa.¹⁰ Bahkan Indonesia dikatakan baru terbentuk setelah Belanda keluar dari Serambi Mekah itu.

Versi apapun yang terjadi, hampir semua sepakat bahwa kegelisahan Aceh itu berawal dari kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di belunggu. "Orang Aceh bukannya suka berontak, tetapi mereka ingin mempertahankan identitas ke Acehannya."¹¹ Menurutnyanya semua (gede) rakyat Aceh rela memberikan apa saja untuk Indonesia. Sebagai imbalannya, mereka mereka meminta ruang gerak yang luas untuk mengaktualisasikan diri. "Namun, harapan itu sia-sia," setidaknya

¹⁰ Suara Hidayatullah, Oktober 1999. Hal.17

¹¹ Ibid, hal.24

Baginya masalah Aceh ibarat mengupas gedebok pisang . Banyak penyebabnya , tetapi intinya adalah satu : ingin menentukan nasib sendiri. “ Jadi, walaupun masalah pelanggaran HAM selesai, masalahnya belum selesai atau tuntas. Malangnya keinginan itu tidak pernah sampai sampai kini. Angin reformasi rupanya lambat menghalau masalah ini. Dan rakyat Aceh sudah mulai patah semangat.

Dalam pidatonya di hadapan Bung Hatta, Teungku Daud Beurueh memang sudah wanti-wanti :” ... dengan ini , atas nama seluruh rakyat Aceh, saya serahkan mandat sepenuhnya kepada Bung Hatta untuk membubarkan provinsi Otonom Aceh, kapan saja, bahkan malam ini juga ! tetapi jika itu tidak terjadi , kita akan membangun negara dengan cara kita sendiri! “ katanya. Ucapan itu kini tampaknya sedang direalisasikan oleh generasi penerusnya.¹²

2.3. ACEH PASCA SOEHARTO

Sejak pertengahan tahun 1997, bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang sangat berat. Krisis ini ternyata membawa dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Terpuruknya bangsa Indonesia kedalam krisis akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya kepada pemerintah dan cenderung menghapuskan segala keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai Orde Baru selama 32 tahun pemerintahan Soeharto.

Kondisi ini memicu adanya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut adanya perbaikan dan melancarkan desakan agar presiden Soeharto, tokoh yang terkenal dengan kekuasaan tangan besi, bersedia mundur dari jabatannya sebagai presiden. Tekanan yang begitu besar dari rakyat dan mahasiswa yang mencapai puncaknya ketika yang tidak kurang dari 15.000 mahasiswa yang mengambil alih gedung DPR \ MPR dan mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh.

Akhirnya pada 21 Mei 1998 presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Soeharto segera mengatur agar Wakil presiden B.J Habibie disumpah sebagai penggantinya

¹² Gatra, 20 november 1999. Hal.31

dihadapan Mahkamah Agung. Meskipun B.J. Habibie secara lisan mendapatkan dukungan dari ABRI, namun kepercayaan penuh masyarakat baik dari dalam maupun dari dunia Internasional belum bisa pulih. Suara demonstrasi menuntut perbaikan atas reformasi dibidang politik, ekonomi dan hukum masih terdengar, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika terus menurun, kegiatan ekonomi yang mengalami stagnasi total dan kehidupan rakyat dari hari kehari semakin susah.

Setelah berjalan, ternyata kekuasaan presiden B.J. Habibie sangat lemah. Ada beberapa alasan mengapa kekuasaannya sangat lemah yaitu ¹³ pertama, Habibie dipandang tidak legitimate memegang kekuasaan sebagai presiden. Ada anggapan bahwa kepresidenan Habibie tidak konstitusional karena tidak dipilih oleh MPR, dan hanya disumpah oleh Mahkamah Agung. Alasan kedua adalah adanya anggapan yang sangat kuat dikalangan masyarakat bahwa Habibie merupakan warisan Soeharto yang mempunyai prilaku dan kebijaksanaannya akan sama dengan Soeharto. Oleh karena itu, apabila Soeharto mundur maka Habibie harus mundur, karena Habibie merupakan kepanjangan dari Soeharto.

Ketiga, Habibie tidak memiliki basis massa yang kuat untuk membangun kekuasaan. Dalam hal ini Habibie bukanlah seorang politisasi yang telah membangun kepercayaan dan basis politik dari bawah. Habibie hanyalah seorang yang dimunculkan dan dibesarkan oleh soeharto lewat kepercayaan yang diberikannya untuk memegang jabatan menteri dan sejumlah posisi strategis lainnya.

Keempat, presiden Habibie dan kabinetnya dianggap tidak kuat dan sebagian besar merupakan orang-orang Orde Baru. Sejumlah indikasi menunjukkan lemahnya *sence of crisis* serta komitmen Habibie terhadap reformasi mengakibatkan pemerintahan B.J. Habibie semakin sulit memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari rakyat.

Tantangan-tantangan berat dibidang politik bagi pemerintah dan sederetan masaiiah aktual dibidang ekonomi yang mewarnai era pasca Soeharto, boleh dipandang sebagai ciri-ciri massa transisi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Perkembangan sosial politik yang semakin tidak memmentu selama

¹³ Nurhidayat APP dan G. A. Giritno (Yogyakarta), Dalam Tempo 1999. Hal.32

dipandang sebagai ciri-ciri massa transisi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Perkembangan sosial politik yang semakin tidak memnentu selama pemerintahan Habibie justru semakin menghawatirkan. Berbagai tuntutan dan desakan agar B.J Habibie mundur dari jabatannya semakin meluas seiring dengan kegagalannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketidak seriusannya dalam melaksanakan reformasi. Politik indonesia di tahun 2000 adalah sederetan harapan baru sekaligus sejumlah kecemasan. Harapan baru terbentuk setelah Indonesia relatif berhasil melewati ujian pra transisi demokrasi yaitu pemilu 1999. Harapan baru dimunculkan oleh terbentuknya pemerintahan baru presiden Abdurrahman Wahid dan wakil presiden Megawati Soekarno Purtri beserta kabinetnya, yaitu kabinet persatuan Nasional.

Sering terjadinya kontra versi pendapat antar presiden Abdurrahman Wahid dengan Wakil presiden Megawati Soekarno Putri menyebabkan berkembangnya berbagai isu dikalangan masyarakat. Masyarakat menganggap hubungan antara presiden dengan wakil presiden sudah tidak harmonois lagi. Selain itu berbagai pernyataan politik dikeluarkan presiden Abdurrahman Wahid seringkali memicu konflik. dibawah kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid terlihat bahwa kekuasaanya semakin lemah. Hal ini secara tidak langsung pada gilirannya akan memicu pergolakan didaerah seperti Aceh dan daerah lainnya.

Selain itu juga konflik etnis, agama, maupun sosial ekonomi menjadi suatu jaringan persoalan yang kait- mengait dan saling mengacaukan ketertiban, keamanan, tata hukum maupun kemasyarakatan. Akibatnya, konflik antar etnis, antar kelompok, secara horizontal maupun vertikal semakin meluas. Munculnya tuntutan merdeka di berbagai wilayah di Indonesia tidak bisa dianggap enteng dan hannya sekedar wacana. Tuntutan pemisahan beberapa wilayah, dalam hal ini Aceh berakar pada ketidakpuasan berbagai daerah terhadap kebijaksanaan – kebijaksanaan yang terlalu sentralistik selama ini.

Pergolakan terus menerus terjadi di Aceh, sedikit banyak terkait dengan ketidakseriusan (political will) dalam mencari upaya penyelesaian yang tepat. Apabila pada masa Soeharto pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi gerakan separatis adalah dengan cara refresif keamanan ala militer pada saat itu ABRI

dengan Operasi Militernya dimata sebagian rakyat di daerah bagian rawan konflik seperti Aceh menjadi momok yang menakutkan. Kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan militer membawa luka, trauma, dan kesedihan mendalam yang tidak mudah dilupakan oleh rakyat Aceh.

Namun sejak pemerintahan presiden B.J Habibie hingga presiden Megawati, pendekatan yang dilakukan lebih bersifat simpatik dan lebih mengedepankan pada persoalan dasar seperti sosial, politik, ekonomi, keadilan dan hak- hak sipil. Pemerintah juga berusaha untuk tidak lagi menggunakan cara- cara separatisme. Penganganan melalui tindakan tegas ala militer tampaknya perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan.¹⁴ Presiden Abdurrahman Wahid yang menjabat presiden terhitung sejak 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, telah membuat terobosan baru untuk mengatasi gerakan separatisme di Indonesia. Kebijakan yang di ambil oleh presiden Abdurrahman Wahid dalam mengatasi masalah dan tuntutan merdeka dari sebagian wilayah Indonesia adalah melalui langkah- langkah persuasif. Pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid tercatat berulang kali melakukan dialog baik antar pemerintah maupun dengan GAM. Negosiasi ini sedikit berhasil menekan eskalasi konflik.

Untuk mengatasi ancaman disintegrasi yang sedang melanda Indonesia, pemerintah telah menempuh kebijakan- kebijakan yang tebagi menjadi kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Kebijakan ini dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dengan didukung oleh partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat khususnya didaerah yang rawan konflik, untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kebijaksanaan atau langkah apapun yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi daerah-daerah rawan konflik yang dapat mengalami disintegrasi negara bangsa, maka kebijaksanaan itu harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah yang selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun bergolak yang terjadi di Aceh yang merupakan gejala separatisme dan upaya untuk memerdeakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan untuk

¹⁴ Lihat N.T Budi harjanto, " Tiga Bulan Pemerintahan Habibie," Perkembangan Politik Juni- Agustus, Analisis CSIS, Tahun XXIII, No.4. op.cit. hal.412

merdeka ini sebagai akibat dari tindak kekerasan militer yang kemudian meluas menjadi kekecewaan multi dimensional. Gerakan separatisme di Aceh dapat diidentikkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM merupakan bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Aceh yang disebabkan oleh ketidakadilan pusat terhadap daerah . Dan gerakan itu merupakan bentuk protes rakyat Aceh yang menuntut keadilan dan keistimewaan daerahnya sebagai daerah Otonom kepada pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat mempersepsikan tuntutan rakyat Aceh sebagai Gerakan Pengacau Keamanan yang kemudian diantisipasi dengan dikirimnya pasukan militer ke Aceh untuk menjaga keamanan dan ketertiban didaerah itu, dan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer.

Aceh yang merupakan daerah dengan kehidupan sosio kultural yang khas ciri Islam sebagai identitas utamanya. Aceh dan Islam merupakan satu-kesatuan yang sukar dipisahkan . Al-Qur'an dan Sun'ah Rasul telah menjadi kepercayaan dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Dan pemerintah menanggapi kekhasan yang dimiliki oleh rakyat Aceh dengan pemberian Otonom sebagai Daerah Istimewa Aceh, yang memiliki hak otonomi dalam bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat atau kebudayaan. Namun kenyataannya Dearah Istimewa Aceh harus rela terus menerus hidup dalam keterbelakangan pendidikan, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakberdayaan politik.

Faktor historis inilah yang membuat rakyat Aceh untuk memisahkan diri dari indonesia. Prilaku diskriminatif dan ketidakadilan yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru ini telah memicu berbagai konflik dan menjadi benih-benih disintegrasi bangsa yang berakar pada ketidakseimbangan hubungan pusat dengan daerah. Kesalahan menejemen sosial pada masa Orde Baru ini menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat daerah. Selain kesalahan Orde Baru , pemerintahan era reformasi sedikit banyak menjadi faktor pendukung bagi daerah untuk merdeka .Hal ini terkait erat dengan semangat reformasi yang disertai dengan era keterbukaan yang kemudian melahirkan kekuatan baru bagi daerah untuk menuntut kembali hak- haknya yang telah dirampas oleh pemerintah pusat.

Keinginan rakyat Aceh untuk dapat mengaktualisasikan identitasnya dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam, ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan diberikannya kedudukan Aceh sebagai daerah Istimewa ditiga bidang sekaligus, yaitu, syariat Islam dan adat pendidikan. Namun, meskipun pemerintah sudah memberikan keputusan Perdana Menteri No. 1 \ MISI\ 1959 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri, Hardi . SH, tetapi ternyata proses itu hanya sekedar cek kosong bagi masyarakat Aceh. Di ijkannya penggunaan syariat Islam sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh presiden Soekarno dulu ternyata tidak terwujud.

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru masih juga nasib masyarakat Aceh tidak menentu. Dengan diberlakukannya UU no. 5 \ 1974 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 5 \ 1979 tentang pemerintahan desa maka keistimewaan yang dimiliki Aceh menjadi tereliminasi dengan sendirinya.¹⁵ Setelah keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh kedua Undang-undang tersebut diberlakukan maka struktur tata negara, hukum, adat, masyarakat Aceh menjadi hilang dan digantikan oleh struktur pemerintahan modern setingkat RW, Dusun, Desa, Kecamatan, Kelurahan dan Propinsi.

Keuchek, Imam Meunasah, dan Tuha Peut menjadi tidak berfungsi lagi, begitu juga dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi terhenti. Karena struktur budaya Aceh dengan syariat Islam menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, pelaksanaan pemerintahan dengan melakukan penyeragaman pemerintahan Desa dan daerah telah mematikan budaya adat di Aceh, sekaligus mematikan keistimewaan yang dimiliki rakyat Aceh dengan pelaksanaan syariat Islam yang kuat di dalamnya. Persoalan inilah yang kemudian memicu keinginan rakyat Aceh untuk mengembalikan keistimewaan yang dimiliki melalui tuntutan Aceh merdeka. Dan kini setelah pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Harapan itu muncul kembali, masyarakat Aceh teringat akan janji- janji yang pernah diucapkan oleh Megawati saat berkunjung ke Aceh yaitu "apabila Cut Nyak berkuasa nanti, tidak akan dibiarkan setetes darah pun mengalir kebumi Serambi Mekah." Untuk itu, kredibilitas pemerintahan

¹⁵ Riza Sihbudi, (at.al). hal.53

Digital Repository Universitas Jember

Megawati akan sangat tergantung pada realisasi janji- janjinya itu, bukan pada susunan kabinet. Namun, serangkaian peristiwa di Aceh kembali menghadirkan bayang- bayang masa lalu yang gelap. Bersamaan dengan pengumuman kabinet barunya, misalnya, 31 warga Aceh dibantai oleh "kelompok bersenjata" diperkebunan julok, Aceh Timur. Kemudian, bentrokan bersenjata antara pasukan TNI \ Polri dan gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengalami eskalasi. Lalu, menjelang kunjungan presiden ke Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala ditembak mati.

Memang pemerintahan Megawati yang menempatkan keutuhan wilayah sebagai prioritas, mulai memberi perhatian khusus kepada Aceh. Misalnya, "mengizinkan," "mengizinkan," pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memberi otonomi khusus bagi Aceh. Lalu, dalam RAPBN 2002, terlihat niat pemerintah untuk merealisasikan janjinya dengan mengalokasikan dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam bagi Aceh sebesar 70%.

Ketiga hal itu, pemerintah sudah barang tentu merasa bahwa Aceh, termasuk GAM, seharusnya sudah puas, dan tidak lagi menuntut kemerdekaan. Namun, semua itu belum tentu dapat menghentikan konflik. GAM. GAM Misalnya, diperkirakan masih akan terus menuntut kemerdekaan. Bagi masyarakat Aceh umumnya, janji-janji pembangunan belum tentu dapat mengembalikan kepercayaan kepada Jakarta. Karena masyarakat Jakarta terlalu sering diberi janji. Yang dikhawatirkan adalah, ditengah ketidakpercayaan masyarakat itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah Aceh melalui jalan militer. Bagi pemerintah dan sebagian masyarakat Indonesia, Aceh akan kembali dilihat sebagai simbol kekacauan, pemberontakan, dan pembangkangan.

Padahal, jalan militer terbukti tidak dapat memberi solusi untuk Aceh. Jalan militer sudah kerap dicoba untuk meemadamkan pemberontakan. Aceh, Khususnya dalam periode daerah operasi militer (DOM) tahun 1989- 1998. Namun operasi brutal ABRI itu justru memperkuat GAM dan memperbesar kebencian masyarakat terhadap pemerintah. Kehadiran belasan ribu pasukan TNI

dan Polri pasca DOM juga belum dapat menyelesaikan masalah . Dengan kata lain, jalan militer sangat berpotensi untuk *a solution in search of a greater problem*. Yang mengherankan, sampai saat ini Jakarta belum juga mampu memahami apa yang menjadi akar konflik di Aceh, baik pada tingkat strategis maupun taktis. Pada *tingkat strategis*, kemampuan tercermin dalam inpres Nomer 4\ 2001, yang menyebutkan “ ketidakpuasan masyarakat “ dan eksistensi GAM, “ yang sebenarnya merupakan manifestasi dari konflik di Aceh.

Padahal, masalah Aceh harus dilihat sebagai masalah ketidakadilan yang merupakan *resultante* dari *eksploitasi, sentralisasi, opresi, dan impunity*. *Eksplorasi*, berupa ketimpangan antara, ” kewajiban” Aceh kepada pusat dan “ bantuan “ pusat kepada Aceh”, telah melestarikan kemiskinan dipropinsi kaya itu. *Sentralisasi*, dalam bentuk pemaksaan keseragaman atas nama persatuan selama Orde Baru, telah merusak dan mengancam identitas kultural keagamaan di Aceh. *Opresi* , dalam bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi oleh militer, telah melahirkan trauma dan kebencian dikalangan masyarakat. Dan *impunity*, berupa keengganan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi, menjadi penyebab hilangnya kepercayaan dikalangan masyarakat.

Penerapan syariat Islam, pemberlakuan UU NAD, dan bagi hasil kekayaan yang lebih besar bagi Aceh, baru menyentuh sebagian akar masalah. Sebuah penyelesaian komperhensif harus menjawab keempat akar persoalan tersebut secara bersamaan. Untuk itu, prioritas harus tetap diberikan pada upaya *negotited political settlemen* melalui dialog dengan seluruh masyarakat di Aceh., termasuk GAM. Kehadiran polisi perlu juga dibatasi pada upaya menegakkan hukum dan peraturan, yang didukung oleh operasi kontra *insurgensi* yang selektif. Untuk itu, disiplin profesionalisme, dan kejelasan wewenang antara TNI dan polri menjadi mutlak.

Pada tingkat taktis, berlarut- larutnya konflik di Aceh disebabkan oleh tidak adanya kesamaan cara pandang dari Jakarta dengan pihak GAM . Misalnya , pada saat pemerintah mengupayakan jalan, “dialog” kalangan di TNI dan DPR masih tetap mengedepankan wacana “ libas” dan “ tumpas”. Selama Jakarta

belum bisa mengatasi konflik diatas, konflik akan terus berkembang , kalau jalan militer yang ditempuh kembali maka dapat dipastikan rasa terealienasi dikalangan masyarakat Aceh akan semakin kuat. Akibatnya akan semakin sulit bagi mereka untuk memahami mengapa Indonesia yang pernah begitu dekat kini terasa semakin jauh. Semua pihak di Jakarta perlu memahami bahwa persoalan Aceh adalah persoalan keadilan, tanpa keadilan, prinsip *udeep saree matee syahid* (hidup adil mati sahid) akan kembali menggelora .

Oleh karena itu tantangan bagi pemerintahan megawati adalah mencegah masyarakat Aceh tersudut dan jatuh ke dalamn prinsip fatalistik *nibak jule' ng got buta, nibak meutungge' ng got meuleungkop, nibak gante' ng got putoh*(daripada juling lebih baik buta, daripada miring lebih baik tumpah, daripada genting lebih baik putus).¹⁶

¹⁶ Peneliti CsIS, Jakarta , dalam Tempo 16 September 2001

BAB III

STABILITAS DAN KEAMANAN DALAM NEGERI INDONESIA

3.1. Pengaruh Gerakan Aceh Merdeka terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan dalam Negeri Indonesia

Separatisme Aceh merdeka atau yang lebih dikenal dengan GAM ini yang terjadi sebagai akibat dari pemerintahan yang sentralistik dan militerisme dan atau sebagai protes dari rakyat sipil terhadap pemerintah karena ketidakpuasan terhadap berbagai bidang kehidupan sehingga mengakibatkan lahirnya separatis GAM pada tahun 1970-1990-an yang dipimpin oleh Tgk. Daud Beurueh, dan kemudian muncul lagi pada tahun 1976 atas pimpinan Hasan Tiro, karena waktu itu Hasan Tiro melihat penderitaan rakyat Aceh sehingga ada keinginan untuk memberontak untuk mengembalikan Aceh ke bentuk semula yaitu Kerajaan Islam Aceh Darussalam dan ingin mendirikan negara Islam.¹

Berlarut-larutnya konflik Aceh ini mempengaruhi situasi dan keamanan dalam negeri, dalam hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta menghambat penanaman modal Asing karena situasi Indonesia tidak menentu, akibatnya para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. karena kekacauan terus saja terjadi hingga saat ini, dan masalah-masalah di Indonesia membawa pengaruh bagi citra Indonesia di dunia Internasional.²

Konflik dan kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia ini telah menciptakan ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan bagi upaya Indonesia melepaskan diri dari krisis ekonomi. Indonesia memerlukan teritorial integriti dari masyarakat internasional agar konsentrasinya dalam pembangunan tidak terganggu oleh bahaya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu negara akan tetap mempertahankan kekuatan pemerintah, ekonomi dan kultur atas warganya diarena eksternal. Akan tetapi pemerintah hanya dapat menggunakan kekuatan itu

¹ Daniel Dakhidae, Aceh, Jakarta, papua, Akar Masalah dan alternatif Proses Penyelesaian Konflik. Jakarta, YAPPIKA, 2001, hal. 5

² Kompas, 22 Agustus 2000

melalui kolaborasi yang aktif dengan negara lain, dengan wilayah dan lokalitas mereka, dan dengan kelompok serta asosiasi transnasional.³

Pemerintah mengambil langkah-langkah seperti melakukan kunjungan ke luar negeri, untuk menggalang dukungan internasional terhadap keutuhan RI, dan mengantaisipasi campur tangan asing terhadap integritas teritorial Indonesia. Dukungan politik dukungan ekonomi juga sangat diharapkan oleh Indonesia dari negara-negara yang dikunjunginya. Dimana dukungan ini tidak hanya berarti pinjaman tetapi juga untuk menarik sebanyak mungkin investor dari luar dan untuk memulihkan kepercayaan luar terhadap Indonesia.⁴ Tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang telah menyulut dan mempertajam konflik sosial dan politik di berbagai wilayah tanah air sangat terbatas, sebagai pilihan yang dianggap paling efektif dan sangat mendesak untuk memobilisasi dukungan ekonomi internasional. Apalagi di era globalisasi, hubungan-hubungan global yang terjadi didasarkan atas pertumbuhan ekonomi.

Kerjasama luar negeri ini semakin penting jika memperhatikan pendapat dari Paul Hirst dan Graham Taylor yang mengatakan bahwa Sebuah perekonomian yang benar-benar global dinyatakan telah muncul, atau sedang dalam proses kemunculan, dimana perekonomian nasional yang khusus dan, karena itu strategi domestik perekonomian nasional semakin tidak relevan.⁵ Indonesia harus secepatnya menarik kembali modal investasi asing yang telah meninggalkan Indonesia sejak meletusnya kerusuhan, Mei 1980, karena pada kenyataannya, menurunnya efektifitas ekonomi selama krisis adalah karena menurunnya investasi. Dengan menarik kembali investasi sebanyak mungkin, maka pemerintah dapat berharap bahwa efektifitas perekonomian nasional akan segera pulih yang kemudian berdampak positif pada daerah-daerah yang rawan disintegrasi.

Menghadapi situasi yang demikian itu, salah satu alternatif yang diambil presiden Abdurahman Wahid pada waktu itu adalah dengan menjalankan

³ Ibid, hal.6

⁴ Kompas, 24 November 2000, hal.84

⁵ Anthony Giddess, "Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi," PT. Pustaka Utama, 2000,hal.33

kebijakan bertetangga baik.⁶ Ia tidak ragu-ragu mengunjungi negara-negara manapun didunia sepanjang itu dirasakan membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi. Faktor ekonomi telah menjadi fokus utama kebijakan luar negerinya karena memang itulah yang menjadi akar permasalahan di Indonesia.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah keamanan in selama ini dapat melemahkan sendi-sendi lembaga demokrasi yang tengah dikembangkan di Indonesia saat ini, salah satu tugas utama pemerintah adalah mengembangkan lembaga politik dan hukum yang kuat agar pemerintah menjadi efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga rakyat akan memberikan dukungan secara penuh pada pemerintah, karena kalau tidak demikian, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah berkurang.

Pemerintah yang lemah ditandai dengan kinerja lembaga nasional yang buruk dan tidak efektif dan ini dapat menimbulkan keperihatinan yang mendalam diantara negara-negara tetangga Indonesia. Apalagi berlarut-larutnya konflik horizontal ini dapat mempercepat penyebarluasan budaya kekerasan, terlebih-lebih ditengah-tengah melemahnya aturan perundang-undangan .

Berlanjutnya unjuk rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap investasi asing ini dan bahkan karena ketakutan akan ancaman balkanisasi atau kudeta oleh militer, masyarakat internasional mempunyai kepentingan kuat untuk mendukung Indonesia. Penyelesaian konflik internal itu menjadi prasyarat penting bukan hanya dalam membangun lembaga-lembaga demokrasi tetapi juga untuk memberikan keyakinan akan masa depan stabilisasi dan keamanan di Asia Tenggara.

Munculnya separatisme di Aceh yang lebih disebabkan oleh masalah dalam negeri, namun keberhasilan lebih ditentukan oleh dukungan negara-negara asing, karena ancaman disintegrasi di Indonesia merupakan persoalan domestik yang telah mendapat perhatian serius masyarakat internasional .⁷ Dalam kontek yang demikian, kebijakan politik luar negeri presiden Wahid adalah memang tidak

⁶ Ibid, hal .35-37

⁷ Ibid, hal. 45

hanya semata-mata mengatasi persoalan didalam negeri dan mengupayakan percepatan modal asing ke dalam negeri, akan tetapi lebih meluas menjadi semacam diplomasi preventif karena berupaya mencegah intervensi luar terhadap gerakan separatisme di Indonesia khususnya di Aceh.

Jika kita menengok ke Serambi Mekah, eskalasi dan kualitas kekerasan sebagai akibat konflik yang tidak terselesaikan telah membuat rakyat Aceh menderita karena apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat tetap saja orang masih mati terbunuh, baik dari kalangan militer, masyarakat, GAM, begitu juga dengan yang kini terjadi di Maluku dan Irian Jaya.

Sejak Pemerintahan Habibie hingga pemerintahan Megawati konflik dan kekerasan semacam itu tidak pernah terselesaikan dengan tuntas.” Lepasnya Timor-Timur kelihatannya bisa dijadikan contoh dari akibat terparah yang bakal dinikmati “manakala strategi penyelesaian berbagai konflik itu tidak efektif, jika pemerintah terus menggunakan pendekatan militer untuk memecahkan berbagai persoalan, sehingga bahaya disintegrasi semakin mengancam Indonesia. Sejalan dengan krisis yang menimpa Indonesia, maka dari segi ekonomi upaya-upaya diplomasi Indonesia diarahkan pada usaha-usaha memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk kepentingan pembangunan nasional.⁸

Selanjutnya, upaya pemulihan citra positif Indonesia merupakan prioritas utama dalam misi diplomasi. Karena masalah internasional seperti penegakan hukum, stabilitas keamanan, pelanggaran HAM, kolusi, korupsi, nepotisme masih menjadi pokok-pokok permasalahan yang dapat menghambat upaya pemulihan citra. Ketergantungan Indonesia pada institusi ekonomi internasional seperti IMF dan *World Bank* juga menyebabkan *Bargaining Position* yang dimiliki masih kurang kuat. Karenanya, dibutuhkan komitmen dan upaya yang sangat tinggi agar citra positif dapat diraih kembali walaupun tidak dapat dalam waktu sekejap.

Bahaya disintegrasi bangsa dan negara dihadapkan pada kecenderungan baru di kalangan negara-negara Barat baik melalui PBB maupun melalui bentuk-

⁸ Indonesia Permanaen Mission Genewa \ www.3.itu.int/Mission/Ind/news/cpo1122.Menlu.htm

bentuk kerjasama lainnya melakukan intervensi kemanusiaan kalau perlu dengan kekuatan militer. Jika pemerintah Indonesia tidak dapat menyelesaikan politik atas masalah-masalah Aceh, Ambon, dan Irian Jaya misalnya, maka hal ini akan memberi peluang bagi negara-negara Barat, LSM-LSM Barat, maupun elemen-elemen separatis di dalam negeri untuk mendesak masyarakat internasional agar melakukan "intervensi kemanusiaan" yang akan melanggar kedaulatan Indonesia. Upaya menyikapi tantangan disintegrasi tersebut, pemerintah akan melaksanakan secara sungguh-sungguh UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di samping itu yang perlu di upayakan adalah keharmonisan sikap diantara elite politik termasuk pejabat negara dalam menyikapi penyelesaian masalah-masalah tersebut.⁹

3.2. Kebijakan Pemerintah Dalam Meyelesaikan Konflik Aceh

Aceh hingga hari ini masih dicekam kemurungan, karena konflik dan kekerasan masih merebak di Serambi Mekah itu.. Aceh adalah tragedi sekaligus kepahlawanan. Sabtu 30 Maret 2002 sebanyak 11 orang tewas di kawasan desa Keumala Lengau, Kecamatan Peurelak, Aceh Timur. Aparat Keamanan dan GAM saling melontarkan tuduhan atas kejadian itu.

Beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah untuk meredam konflik di Aceh atau untuk mengatasi gejolak yang ada tersebut. Tawaran perundingan dengan pihak GAM, Jeda Kemanusiaan serta telah disahkannya Undang-undang Nangroe Aceh Darussalam, ternyata belum cukup untuk meredam tindak kekerasan yang terjadi di Tanah Rencong ini, kekerasan berdarah tetap tidak pernah surut, bahkan semakin meningkat. Pada Februari 2002 lalu, Aceh kembali menjadi perhatian karena terjadinya sebuah episode baru dalam rangkaian tragedi lama yang belum kunjung henti.

Setelah terjadi tarik ulur selama beberapa waktu, akhirnya sebuah agenda dimplementasikan, yaitu diaktifkannya kembali Komando Daerah Militer 1 Iskandar Muda (Kodam Iskandar Muda) di Nangroe Aceh Darussalam.

⁹ Indonesia Permanen Mission Geneva\ www.3.itu.int/Mission/ind/news/cpo1122menlu.htm

termasuk TNI, Polri. Upaya-upaya dialog yang setara juga tetap perlu diupayakan disamping cara lain yang elegan dan jauh dari pelanggaran HAM.¹¹

Pemerintah berusaha mengedepankan langkah-langkah dialog dan berusaha memulihkan kondisi keamanan, namun disisi lain pemerintah kurang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat Aceh. Dalam hal ini Gerakan Aceh Merdeka yang selama ini dipandang atau dituding berada dibalik berbagai kasus kekerasan juga diminta menghentikan aksi-aksi mereka, demikian kata Menteri Koordinator bidang Poltik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono. Kuatnya desakan dari berbagai pihak agar pemerintah bertindak bijaksana dalam menangani kasus Aceh.

Gubernur Aceh Abdullah Puteh sebelum berdialog dengan para pejabat lainnya menyampaikan adanya ketimpangan dalam penanganan masalah Aceh sesuai dengan instruksi Presiden No. 4 tahun 2001 ia melihat, “ Penanganan masalah keamanan lebih dikedepankan, sementara bidang lainnya tidak bisa karena ketidakadaan dana” padahal, yang diharapkan berjalan seimbang sehingga dapat dianggap penanganannya komprehensif.¹² Hingga saat ini dana untuk itu belum direalisasikan oleh pemerintah pusat. Yudhoyono mengakui kritikan dan harapan masyarakat dari berbagai kalangan dalam pertemuan tersebut, ia telah memberi gambaran bahwa pemerintah harus sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan kepercayaan rakyat Aceh dengan program-program yang nyata.

TNI dan POLRI juga dihimbau untuk terus mengupayakan penghentian kekerasan dan aksi-aksi pelanggaran HAM, pihaknya juga melaksanakan profesionalisasi disiplin dan kemampuan pengendalian diri dari aparatnya sambil mengemban tugas yang tak mudah dan penuh tanggung jawab di lapangan.¹³

GAM juga diharapkan menghadirkan kedamaian dan berhenti melakukan aksi-aksi kekerasan karena sejumlah tindak kekerasan di Aceh dilakukan oleh GAM, terbukti dalam beberapa kasus terakhir adanya keterlibatan elemen-elemen

¹⁰ Majalah Suar, “ Kodam Iskandar Muda “ Inikah Solusi Untuk Aceh, Vol. 3, No. 9. April 2002

¹¹ *Pemerintah serius Selesaikan Konflik aceh dengan Dialog* Kompas 23 agustus 2001

¹² Ibid, hal. 10

¹³ Ibid, ha. 111

garis keras GAM dalam aksi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kasus di Riyek, kabupaten Aceh Timur, yang terjadi bulan lalu telah menewaskan puluhan orang, kesaksian dan bukti-bukti hingga saat ini telah didapatkan gambaran utuh dan hampir pasti pelakunya adalah elemen-elemen garis keras GAM, kata Yudhoyono. Adapun kesimpulan yang didapatkan oleh data-data Intelijen yang mengungkapkan bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi proses perdamaian bisa dilakukan dilapangan.¹⁴

Kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM yang telah dicapai di Genewa, Swiss, juga di tidak akan bisa dilakukan karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, perjanjian damai itu tidak pernah terlaksana, baik dari perjanjian Jeda kemanusiaan I maupun Jeda Kemanusiaan II Oleh sebab itu, untuk mengatasi disintegrasi bangsa, dalam hal ini munculnya tuntutan merdeka dari gerakan separatis di Aceh dan Papua, presiden Abdurrahman Wahid telah melaksanakan kebijakan dalam negeri yang terbagi dalam beberapa langkah, yaitu:

1. Mengembalikan keamanan di daerah melalui pendekatan komperhensif meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan.
2. Melakukan kompromi melalui dialog dan perjanjian diantara pihak-pihak yang terlibat konflik
3. Mempercepat pelaksanaan otonomi dan demokratisasi didaerah dengan disahkannya UU No.22\ 1999 dan UU No. 25\1999

Pendekatan komperhensif yang telah dilakukan oleh pemerintah ini adalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Percepatan pembangunan ini dilaksanakan diberbagai bidang kehidupan dan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh yang jujur dan adil. Pembangunan harus disertai dengan pembinaan terhadap masyarakat secara berencana dan berkesinambungan dengan sasaran yang jelas bagi proses alih tugas dan dengan segera menyerahkan tanggung jawab lebih banyak kepada putra dan putri daerah untuk pembangunan

¹⁴ Ibid, hal.12

di daerah mereka. Adapun hal lain dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pendekatan budaya.¹⁵

Pendekatan budaya ini merupakan salah satu usaha memahami sejarah konflik, lalu mempelajari budaya lokal dan berbagai etnik setempat secara terperinci, mengadakan dialog dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan adat setempat untuk mendengar aspirasi mereka serta alternatif jalan keluar yang mereka tawarkan.

Pendekatan ini dilakukan pemerintah karena pemerintah menyadari bahwa pendekatan yang selama ini di pakai dalam mengatasi persoalan Aceh dan daerah konflik lainnya ternyata tidak efektif dan justru menimbulkan konflik baru, Karena akibat pendekatan militer ini, pemerintah banyak menuai hasilnya yaitu adanya amnesti internasional tentang tindak pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia dalam hal ini ABRI. Oleh sebab itu Gus Dur memilih mengutamakan upaya jalan damai dan penghentian kekerasan.¹⁶

3.4. Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh

Solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh sangat terkait dengan bentuk akar masalahnya. Artinya , tanpa mengenali soal-soal dasar persoalan, masalah Aceh tidak akan terpecahkan. Dari polarisasi sosial yang terjadi saat ini maka penyelesaian konflik Aceh dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu cara dialog dan cara otonomi khusus. Kedua bentuk penyelesaian yang ditawarkan tersebut sangat terkait dengan persoalan identitas baik dalam pengertian citra diri dan harga diri. Adapun solusi yang di tawarkan pemerintah kepada rakyat Aceh adalah seperti di bawah ini:

A. Negosiasi Melalui Dialog Dan Kompromi

pemerintah telah melakukan kompromi berupa ditandatanganinya kesepakatan bersama yaitu Jeda Kemanusiaan pada tanggal 12 Mei 2000 oleh wakil pemerintah Indonesia yaitu DR.Hasan Wirajuda dan wakil GAM DR. Zain

¹⁵ JJ. Kusni, " *Negara Etnik: Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak*," FUSPAD(Forum Study Perubahan dan Peradaban), Yogyakarta, 2001, hal.37

Abdullah adapun isi kesepakatan tersebut adalah :¹⁷ (a). Penyampaian bantuan keamanan kepada penduduk Aceh yang terkena akibat dari situasi konflik. (b). Adanya ketentuan-ketentuan modalitas keamanan yang dimaksudkan untuk mendukung penyampaian bantuan keamanan dan untuk mengurangi ketegangan serta kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan lebih lanjut. (c.) Peningkatan langkah-langkah membangun kepercayaan keuanan arah penyelesaian damai terhadap situasi konflik aceh. (d). Jeda Kemanusiaan terdiri dari dua komponen, yaitu aksi keamanan dan modalitas keamanan. (E). Menjamin pengurangan ketegangan dan penghentian kekerasan. (f). Menjamin tidak adanya tindakan-tindakan yang bersifat serangan militer oleh angkatan RI dan GAM. (g). Menjamin kelanjutan fungsi polisi yang normal untuk penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum termasuk pengendalian kerusuhan, pelarangan gerakan dari orang sipil yang bersenjata. (H). Memberikan bantuan dalam penghentian tindakan yang bersifat serangan oleh elemen-elemen yang bersenjata yang bukan dari pihak-pihak pada kesepakatan bersama.

Perjanjian ini mulai efektif tanggal 13 Mei 2000 dan tiga bulan berikutnya. Dengan perjanjian ini diharapkan rakyat Aceh mendukung Join Undustanding (Jou) tersebut serta mampu menata kembali perekonomian yang terpuruk akibat konflik yang berkepanjangan. Penandatanganan kesepakatan ini dilaksanakan di Genewa ,Swiss, yang di pelopori oleh Henry Dunant Centre berjalan mulus tanpa ada kendala.

Kesepakatan bersama ini merupakan keinginan kedua pihak untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan, mengurangi ketegangan dan mampu menghentikan kekerasan di Aceh. Di harapkan kesepakatan ini dapat juga meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah pusat dengan GAM dalam upaya mencari penyelesaian damai, serta untuk mencari jalan keluar konflik yang selama ini belum tuntas.¹⁸

¹⁶ Ibid, hal. 39

¹⁷ Hariyanto, " *Penanganan Masalah Aceh dalam Krangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,*" Makalah tidak di terbitkan dari kertas Perorangan (Taskap) Kursus Reguler Angkatanm IX Lemhanas, Jakarta, 2001, hal.39-49

¹⁸ Ibid, hal 50

Kenyataannya pasca penandatanganan Jeda Kemanusiaan ini I masih terjadi konflik antara TNI dan GAM yang mengorbankan banyaknya rakyat sipil. Sebagai akibatnya Jeda Kemanusiaan I ini berakhir pada 6 Agustus 2000 dan harus diperpanjang melalui Jeda Kemanusiaan II yang berlaku tanggal 24 September 2000 sampai 15 Januari 2001. Jeda Kemanusiaan II ini kemudian diperpanjang lagi dengan Moratorium I sampai dengan 15 Februari 2001.¹⁸ Dalam perkembangan selanjutnya perjuangan dengan GAM telah menampakkan hasil berupa perundingan antara pemerintah pusat dengan GAM di Genewa, Swiss, yang menghasilkan Jeda Kemanusiaan I dan II tersebut.¹⁹

Kesepakatan bersama Jeda Kemanusiaan ini di tandatangani di *Dore Al Bowois*, Swiss, tanggal 12 Mei 2000 oleh wakil Indonesia DR. N.H. Wirajuda dan wakil GAM DR. Zein Abdullah. Adapun tujuan perjanjian dari Jeda Kemanusiaan ini adalah untuk rekonsiliasi dan menepis sikap saling tuding antara TNI dan GAM, karena selama ini pihak GAM dan aparat militer saling menuding tentang penyerangan dan tindak kekerasan yang terjadi di Aceh, dan hingga saat ini masih ada saja yang tewas. Dalam perundingan ini pihak GAM menuntut agar dilakukan penarikan kembali pasukan militer dari proyek vital kawasan industri Lhoksemawe. Dan larangan membawa senjata api bagi kedua belah pihak serta penghentian berbagai operasi yang dilakukan oleh TNI.²⁰

Sementara pihak Indonesia menyetujui perpanjangan Jeda Kemanusiaan dengan syarat, semua harus bekerja sama dalam kerangka negara kesatuan RI. Namun, setelah empat minggu perpanjangan, GAM harus menyetujui otonomi khusus yang akan diberikan kepada Aceh. Apabila dilanggar, maka pemerintah secara sepihak akan membatalkan perpanjangan perjanjian tersebut.²¹

Konsekuensi pemerintah Indonesia telah menandatangani *dokumen front Undustanding Humanitarian Pause for Aceh* adalah GAM berkedudukan sebagai personalitas hukum yang memiliki kapasitas hukum dengan menandatangani suatu perjanjian, sehingga menempatkan dirinya sebagai pihak yang sederajat dan

¹⁹ Ibid, hal. 52-53

²⁰ Ibid, hal. 16

²¹ Endry Setyoningrum. Op.cit. hal.94

sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Secara *de facto dan de jure* pemerintah mengakui keberadaan GAM atau gerakan separatis GAM untuk memisahkan diri dari negara kesatuan RI.

Pihak GAM juga memanfaatkan Jeda Kemanusiaan ini untuk mensosialisasikan ide referendum dengan opsi merdeka melalui perpanjangan tangan LSM SIRA dan untuk mensosialisasikan ide tersebut di dunia internasional.²² Karena sebelum di laksanakannya penandatanganan Jeda Kemanusiaan Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu telah mengupayakan dialog dengan pihak Aceh melalui Bondan Gunawan selaku sekretaris pengendalian pemerintah yang bersilaturahmi dengan panglima GAM Teungku Syafei pada awal tahun 2000.²³ Hal yang sama juga dilakukan pemerintah dalam menangani pemberontakan organisasi Papua Merdeka (OPM) di Irian Jaya pada tahun 1990. Akan tetapi gerakan OPM ini bersifat lunak dan jarang menggunakan kekuatan fisik

B. Otonomi Daerah

Negara kesatuan RI dengan otonomi penuh dan luas untuk tiap-tiap provinsi adalah perlu karena itu adalah jawaban untuk mencegah disintegrasi bangsa, sentralisasi, absolutisme, dan militerisme. Dengan mencegah absolutisme dan sentralisme maka dapat dicegah korupsi KKN, kesenjangan dalam bidang ekonomi, ketidakadilan dalam bidang-bidang lain, serta bahaya disintegrasi.

Demokratisasi yang diselenggarakan juga harus melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat terhadap gubernur dan wakil-wakil rakyat di daerah juga akan memperkuat sistem pemerintahan sipil yang mencegah terulangnya militerisme Orde Baru. Selain itu, melalui kompromi dan dialog serta negosiasi, pemerintah juga telah menetapkan UU No. 22\1999 dan UU No.25\1999. UU No. 22\1999 ini mengatur tentang otonomi daerah dan UU No.25\1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berlakunya UU otonomi di daerah yang sesuai dengan azas desentralisasi dan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2001, maka akan memberikan peluang

²² Ibid, hal. 17

²³ Ibid, hal. 17

bagi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri serta dapat memberi peranan yang lebih besar pada pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya, dengan begitu maka pembangunan nasional tidak berjalan sentralistis di pusat dan pemerintah pusat dapat menjawab tuntutan keadilan dari daerah-daerah, sehingga bangsa Indonesia akan terhindar dari ancaman disintegrasi.

Kebijakan pemerintah menetapkan otonomi daerah perlu tindak lanjut secara terus menerus. otonomi daerah yang saat ini telah berjalan masih perlu perbaikan, karena terhalang oleh salah satu penafsiran dari daerah mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah dari UU No. 22\1999, yaitu ²⁴

1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah juga menempatkan wewenang dalam arti desentralisasi dan tugas pembentukan yang diikuti dengan penyediaan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.(pasal 1,8,13)
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR sebagai dewan legislatif daerah mempunyai kehendak sejajar dan mitra pemerintah daerah. (pasal 16,2).

Untuk pelaksanaan UU No.22\1999 juga di ikuti oleh Undang-undang No.25\1999 tentang perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Dari beberapa aspek penting dalam UU No.25\1999 adalah ²⁵ Sumber-sumber pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana pinjaman dan lain-lain pendaptan yang sah.(pasal 3)

1. Sumber-sumber pendapatan yang asli daerah mencakup hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan kerja yang dipisah-pisahkan dan pendapatan daerah yang asli.(pasal 4).

²⁴ Undang-undang RI No. 22 tahun 1999, *tentang Otonomi Daerah*, Diperbanyak Oleh PT. Karya Anda, Surabaya, 2000, hal.3-11

²⁵ Safwan Idris, "Pemberian Kewenangan Khusus Kepada Daerah Rawan Disintegerasi dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional." Makalah tidakm diterbitkan dari karya Perorangan (Taskap) Kursus Reguler Angkatan XXXIli, Lemhanas, Jakarta, 2001, hal.65

2. Dana perimbangan dan penerimaan terdiri dari pajak bumi dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam dan alokasi umum dan alokasi khusus (pasal 6)
3. Materi kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada daerah dapat diidentifikasi kedalam tiga golongan, yaitu: (1). Materi yang bersifat umum, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bernegara. (2). Materi yang menyangkut bidang adat, hukum agama, dan budaya dan. (3). Materi yang menyangkut bidang pengembangan kehidupan ekonomi.²⁶

Adapun materi yang bersifat umum adalah *materi* yang sudah dimasukkan kedalam UU No.22\1999, sedangkan materi kedua adalah *materi* yang menyangkut perlindungan identitas golongan etnis, agama, budaya dalam masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Materi golongan ketiga adalah *materi* yang memungkinkan daerah mengembangkan kehidupannya sesuai dengan perekonomian global saat ini.

Materi *otonomi umum* menurut UU no.22\1999 tentang pemerintah daerah, kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah, "termasuk daerah kabupaten dan kotamadya banyak sekali, secara umum, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (pasal 7 ayat 1) " kewenangan bidang lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dan dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional (pasal 7 ayat 2)".

Apabila dilihat dalam pasal 7 ayat 1 ini, konsep otonomi yang dianut oleh UU no. 22\1999 mendekati pada konsep negara federal, kecuali dalam negara federal itu hukum, agama juga menjadi wewenang negara bagian. Karena masih terdapat ayat 2 dalam pasal 7 tersebut maka konsep negara kesatuan menonjol

dimana kebijakan perencanaan nasional, sistem administrasi negara, pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya alam, strategis masih tetap menjadi wewenang pusat. Dan untuk mendukung Undang-undang tersebut, pemerintah daerah mengeluarkan Undang-undang pula yaitu UU no.25\1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Konsep yang pokok dalam UU ini adalah “konsep dana perimbangan “ yang meliputi” bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam” disamping itu dana perimbangan meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus (pasal 6 ayat 1)²⁷

Sebagaimana UU no.22\1999,UU no.25\1999 mempunyai kekuatan sentral yang besar dan mencerminkan negara kesatuan. Disamping materi otonomi umum disini juga terdapat materi otonomi khusus yaitu mengenai kewenangan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia. Adapun tujuan dari kewenangan itu adalah untuk melindungi identitas, agama, dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Melihat UU no.22\1999 dan UU no.25 \1999 dalam kontek kemajmukan masyarakat Indonesia. Masih banyak kewenangan khusus yang dapat diberikan kepada daerah-daerah sesuai dengan kondisi kemajemukan bangsa Indonesia. Untuk daerah tertentu seperti Aceh yang mempunyai sistem pemerintahan warisan adat masa lalu dan Irian Jaya yang sangat luas wilayahnya yang terdiri dari berbagai macam suku, perlu diberi hak untuk mengatur sendiri hukum adat, agama dan budayanya.²⁸

Berdasarkan Tap MPR No.IV\ MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengamankan UU otonomi khusus, maka pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan status otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya.

Kewenangan otonomi ini dimaksudkan sebagai kewenangan khusus lainnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah yang dengan tujuan utama adalah

²⁶ Ibid, hal. 103

²⁷ Syamsudin Ishak, “ dari Maaf ke Panik Aceh,” Lembaga Study dan Pembangunan, YAPPIKA, jakarta, 2001, hal. 20

²⁸ Ibid, hal. 20

pemberian kewenangan dibidang ekonomi serta untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan mengatasi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah yang telah menjadi suatu masalah besar dan menimbulkan dampak kerwanan disintegrasi bangsa. Apabila dilihat dari pasal 7 ayat 2 UU no.22\1999 pemerintah pusat masih memegang wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di samping itu juga di bidang sistem administrasi negara. Dengan kewenangan ini, daerah masih merasa bahwa pengendalian mereka terhadap kekayaan sulit dilakukan, meskipun UU no.25 \1999 menyatakan secara proporsional, adil dan transparan (pasal 1 ayat 1) .Oleh sebab itu kewenangan khusus dalam penguasaan terhadap kekayaan alam dan sumber-sumber ekonomi di daerah perlu diberikan kepada daerah, terutama yang selama ini telah menjadi penyumbang terbesar kepada pusat, akan tetapi mendapatkan hasil yang sedikit sekali dari kekayaan itu, seperti didaerah Indonesia Timur yang kaya akan sumber daya alam (Aceh dan Irian jaya) ²⁹

Pemberian kewenangan khusus yang menyangkut sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia ini bertujuan untuk menegakkan keadilan ekonomi dan politik Indonesia. Untuk itu juga perlu adanya peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Sebenarnya yang ingin di capai pemerintah adalah memberikan kewenangan otonomi umum dan kewenangan khusus kepada daerah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menghormati hak-hak daerah, suku, golongan serta menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari diberikannya kewenangan khusus ini adalah untuk menghilangkan kesenjangan dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran yang merata. Kebijakan pemerintah selanjutnya adalah mengatasi masalah disintegrasi bangsa yaitu dengan cara mengembalikan kultur asli daerah kepada wujud yang sebenarnya. Dengan melalui kebijakan ini pemerintah berharap keberagaman yang

²⁹ Ibid, hal. 23-25

ada di Indonesia tetap terjaga dan menjadi kekayaan tersendiri bagi rakyat Indonesia.³⁰

Terlepas dari hal di atas rakyat Aceh, menginginkan perbaikan kekeliruan masa lalu. Jika selama ini kepada rakyat Aceh telah diberikan lahan tanpa diberikan sarana untuk mengolah lahan tersebut, maka untuk masa yang akan datang kiranya sudah patut untuk diberikan sarana berupa undang-undang tentang pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sehingga di atas lahan yang salam 40 tahun terbengkalai, dengan adanya sarana itu akan dapat diolah untuk ditanami dengan tanaman-tanaman yang mengandung nilai gizi dan vitamin yang tinggi bagi kesehatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau mereka tanami dengan tanaman ekspor yang akan menghasikan devisa bagi RI.³¹

Rancangan UU otonomi khusus bagi Aceh telah menjadi UU oleh DPR. Lewat UU NAD yang telah dikeluarkan tanggal 19 Juli 2001. Undang-undang NAD ini disahkan oleh DPR, dapat pula dilihat sejumlah kewenangan khusus yang diberikan pemerintah kepada Provinsi Aceh. Adapun kewenangan tersebut antara lain : Di perbolehkannya Aceh menggunakan nama NAD sesuai dengan keinginan rakyat Aceh, sementara sebagian kewenangan yang lain adalah³² Dibidang pendidikan, dibentuk Mahkamah Syariah berdasarkan syariat Islam, tetapi untuk kasasi tetap diberlakukan pada Mahkamah Agung yaitu:

- A. Dibidang keuangan, 70% untuk pemerintah pusat dalam hal ini berlaku selama 8 tahun kedepan.
- B. Dibidang politik, (1). Pemilihan Gubernur secara langsung diberlakukan secepat-cepatnya 5 tahun setelah diberlakukannya UU NAD. Pemilihan diselenggarakan oleh komisi independen pemilihan serta komisi pengurus pemilihan yang dibentuk DPRD .(2). Pengangkatan Kapolda, Kajati, dan Hakim dilakukan dengan persetujuan atau pertimbangan Gubernur dan (3). Kebijakan keamanan dikoordinasikan oleh Kapolda kepada Gubernur. Pelaksanaan tugas

³⁰ Ibid, hal 32

³¹ Jawa Post, 23 Juli 2001, hal. 13

³² Kompas. 27 Januari 2000

fungsional dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat dipertanggung jawabkan oleh Kapolda kepada Gubernur.

Mengenai pelaksanaan keistimewaan pendidikan dalam rancangan Undang-undang ini diatur dalam pasal 8, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi Istimewa Aceh diberi kewenangan untuk membuat ketentuan yang mengatur khusus tentang materi pelajaran muatan lokal yang bersifat penambahan terhadap kurikulum nasional, dan diberi hak pula untuk mengembangkan dan memajukan lembaga-lembaga pendidikan agama pada berbagai jenjang pendidikan.

Selanjutnya, pelaksanaan keistimewaan kehidupan adat, yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi Istimewa aceh mengembangkan dan memajukan adat dan budaya daerah yang di jiwai dan sesuai dengan ajaran Islam, dan memajukan adat dan budaya daerah. Mengenai pelaksanaan keistimewaan Aceh ini, dalam rancangan UU tersebut juga menyatakan Pemerintah mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan yang berlaku sesuai dengan kedudukannya masing-masing, namun lembaga tersebut tidak merupakan perangkat daerah. Dalam keistimewaan yang lainnya yaitu dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah mengenai peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah diatur dalam pasal 9, yaitu bahwa:

1. Pemerintah Provinsi Istimewa Aceh dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat daerah membentuk sebuah lembaga yang terdiri dari para ulama yang berkedudukan independen.
2. Lembaga yang sebagaimana yang dimaksud berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah baik diminta maupun tidak.
3. Ketentuan mengenai lembaga tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.³³

Upaya-upaya ini telah di berikan kepada Aceh untuk menyelesaikan masalah Aceh, akan tetapi belum berhasil meredam gejolak di Aceh. Adapun cara lainnya seperti dengan dialog untuk kompromi akan tetapi nampaknya masih belum mendapat tanggapan serius dari masyarakat. Ajakan pemerintah melalui

³³ Syamsudin ishak, Dari Maaf ke Panik Aceh, Lembaga Study Pers dan Pembangunan : YAPPIKA, hal,78-79, 2001.

wakil presiden Hamzah Haz untuk islah kepada GAM justru ditolak oleh GAM. Pemerintah juga telah berencana untuk memberikan amnesti kepada seluruh pengikut GAM, dengan syarat GAM harus meletakkan senjata dan menghentikan aksi-aksinya selama ini. Namun, GAM melalui Komandan Operasi GAM komando Pusat Hasan Tiro, Tgk. Amri bin Abdul Wahab justru menolak tawaran tersebut dengan menyatakan kemerdekaan sebagai harga mati untuk GAM. Selain itu selama periode tahun 2000-2001 warna kekerasan masih kental di bumi Aceh.³⁴

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mencatat lebih dari 2.325 kasus aksi kekerasan yang terjadi di Aceh. Aksi kekerasan tersebut antara lain adalah meliputi pembunuhan diluar proses hukum sebanyak 1000 kasus, penyiksaan 683 kasus, penghilangan secara paksa 107 kasus, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang sebanyak 535 kasus. Hal ini sedikit banyak membuktikan bahwa dalam proses dialog yang diperakarsai oleh Henry Dunant Centre (HDC) dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai yaitu TNI/Polri dan GAM kesatu Meja perundingan. Dan ini pun masih belum membuahkan hasil yang berarti dan tidak dapat menyurutkan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Aceh. Disatu sisi pemerintah mengatakan akan menggunakan cara-cara dialog dan perundingan untuk menemukan jalan keluar atau solusi yang terbaik, tetapi disisi lain operasi militer yang kian intensif masih saja dilaksanakan.

Kebijakan pendekatan keamanan yang telah dilaksanakan pemerintah terbukti dengan rencana untuk membentuk Kodam Iskandar Muda, yang masa presiden Soeharto telah dihapus. Kebijakan ini oleh rakyat Aceh di yakini sebagai DOM bentuk baru yang dianggap akan mengulang trauma militer masa lalu. Berbagai peristiwa tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Megawati untuk mencari solusi terbaik dalam menagani kerawanan disintegrasi bangsa. Untuk itu pemerintah perlu juga menetapkan langkah-langkah lebih lanjut yang dapat menunjukkan peran, fungsi dan kekuatannya secara profesional. Dalam hal ini pemerintah perlu juga mengambil langkah-langkah prakarsa perdamaian yang melibatkan elemen-elemen lokal.³⁵

³⁴ Ibid, hal. 5

³⁵ Ibid, hal. 7

Kesepakatan perdamaian selama ini yang dilakukan hendaknya mampu menjadi kenyataan dalam pelaksanaannya dilapangan. Serta kesepakatan itu perlu ditindak lanjuti dengan langkah-langkah nyata dan di sosialisasikan ke akar masalahnya bersama dengan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai keamanan juga harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga hal ini dapat menjadi dasar yang kuat dan sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk mengatasi disintegrasi bangsa.³⁶

4.3. Melemahnya Peran Indonesia Di ASEAN Akibat Konflik

Pada mulanya ASEAN belum mengutamakan kerjasama ekonomi karena alasan praktis. Namun lambat laun bersamaan dengan perubahan internasional dan regional, kerjasama politik semakin menjadi perhatian.³⁷ Berkaitan dengan hal diatas, sejak era reformasi, kinerja Indonesia dianggap melemah dikalangan ASEAN. Dengan mendasarkan pada hasil penelitian yang dibuat pusat Litbang Politik dan Kewilayahan LIPI, pengamat kawasan seperti DR. Ikrar Nusa Bhakti menyimpulkan kondisi kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN pada masa presiden Abdurrahman Wahid lebih melemah dari pada masa pemerintahan Soeharto dan Habibie.³⁸

Merosotnya peran Indonesia dalam ASEAN ini disesali oleh para diplomat negara-negara anggota ASEAN, tetapi tidak cukup fair jika kelemahan itu di nilai secara sepintas saja, tanpa menyadari bahwa dewasa ini telah berlangsung proses regenerasi kepemimpinan dalam ASEAN, dimana halnya tinggal satu dari kelima negara pendiri masih dipegang oleh orang lama, yakni Mahatir Muhammad dari Malaysia, yang diketahui banyak mempunyai kesamaan visi dan pengalaman dalam memimpin ASEAN bersama-sama dengan para pemimpin ASEAN terdahulu. Sehingga wajar saja, seiring dengan perkembangan kawasan yang cepat akibat derasnya tekanan arus globalisasi, khususnya krisis ekonomi yang melanda kawasan sejak awal tahun 1997, terdapat kesulitan dalam mempertahankan solidaritas dan kohesifitas diantara para pemimpin generasi baru ASEAN.

³⁶ Ibid, hal. 8

³⁷ Indonesia dalam Kerjasama ASEAN

Para pemimpin generasi baru ASEAN adalah bukan pendiri ASEAN yang dengan sendirinya memiliki keterlibatan batin yang sangat kuat pada ASEAN. Mereka tengah di hadapkan pada lingkungan dan tantangan-tantangan yang jauh lebih besar dari pada ASEAN.³⁹ Seperti yang telah diantisipasi oleh para ahli studi keamanan. Tantangan dalam bidang keamanan nasional dan kawasan memasuki abad ke-21 ini semakin kompleks, tidak terkecuali yang dihadapi oleh masing-masing negara anggota ASEAN, yang tidak lagi bersifat tradisional, dan tidak hanya berdimensi militer semata tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi.⁴⁰

Sementara hal lain yang menjadi kambing hitam lemahnya kinerja Indonesia di ASEAN adalah faktor figur Menlu Alwi Shihab yang berbeda dengan mantan menteri luar negeri Ali Alatas. Sebelumnya banyak pihak juga telah memperingatkan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk mengalami Balkanisasi seandainya masalah keamanan yang mengancam Indonesia tidak secepatnya di tangani. Disisi lain terus berlanjutnya kerusuhan etnik di khawatirkan hanya akan memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengambil alih kekuasaan melalui cara-cara kekerasan sehingga pada akhirnya hanya akan menimbulkan implikasi keamanan yang meluas di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah keamanan ini dapat melemahkan sendi-sendi lembaga demokrasi yang tengah dikembangkan Indonesia saat ini. Tugas utama pemerintah saat ini adalah mengembangkan lembaga politik dan hukum yang kuat agar pemerintah menjadi lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga rakyat akan memberikan dukungan secara penuh pada pemerintah. Seperti yang kita lihat sepanjang tahun 1999-2000 ini, pemerintahan yang lemah ditandai dengan kinerja lembaga nasional yang buruk dan tidak efektif sehingga telah menimbulkan keperihatinan yang mendalam diantara negara tetangga Indonesia.

³⁸ Lihat, "Kepemimpinan Republik Indonesia Melemah di ASEAN," Media Indonesia, 14 November 2000: 5

³⁹ Ibid, hal .79

⁴⁰ Lihat Barry Buzan (1991), "People, State and Fear: An agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era (Secon Edition), New York: Harvester Wheatsheaf, 186 et Segg.

Berlarut-larutnya konflik horizontal dapat mempercepat penyebarluasan budaya kekerasan, terlebih-lebih ditengah-tengah melemahnya aturan perundang-undangan. Penyelesaian konflik-konflik internal pemerintah dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang hingga saat ini masih berlangsung merupakan salah satu prasyarat penting, bukan hanya dalam membangun lembaga-lembaga demokrasi tetapi untuk memberikan keyakinan akan masa depan stabilitas dan keamanan dikawasan Asia Tenggara.

Ancaman disintegrasi di Indonesia merupakan persoalan domestik, akan tetapi persoalan ini telah mendapat perhatian dunia internasional maupun dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk menyikapi hal ini pemerintah Abdurrahman Wahid waktu itu berupaya untuk menyakinkan dunia internasional dengan melakukan kunjungan atau lebih meluas menjadi semacam diplomasi preventif karena berupaya mencegah intervensi luar negeri terhadap persoalan di Indonesia khususnya mengenai gerakan separatis GAM dan daerah seperti Papua, dan Maluku.⁴¹ Bagaimanapun juga masalah ini juga dapat mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Situasi politik dan keamanan dalam negeri Indonesia yang belum kondusif ini telah berdampak negatif terhadap proses pemulihan ekonomi serta dapat melemahkan kinerja Indonesia di ASEAN, hal ini terjadi seiring dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto, karena kerusuhan dan kekacauan mengakibatkan ketidakstabilan dalam bidang politik dan keamanan, sehingga kepercayaan dunia internasional melemah terhadap Indonesia pada saat itu.

Badai krisis ekonomi yang kemudian berubah menjadi krisis kepercayaan telah membawa perekonomian ASEAN kedalam resesi atau stagnasi pada tahun 1998. Hampir semua negara-negara di Asia Tenggara tidak terlepas dari dampak *contagion krisis ekonomi* tersebut, bahkan perekonomian seperti Hongkong dan Singapura yang selama ini di sebut-sebut sebagai paling produktif di Asia Timur juga turut melemah. Melemahnya perekonomian Asia Timur dan Tenggara ini secara langsung juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara

⁴¹ Untuk lengkapnya lihat tulisan Humphrey Wangke. "Kunjungan Luar Negeri Presiden Abdurrahman Wahid", Sebuah Upaya Diplomasi Menghadapi Intervensi Asing", dalam kajian, Vol.5 No. 1, hal.23-45

Eropa dan Amerika sebab ekspor mereka ke kawasan Asia menjadi terganggu. Praktis baru di tahun 1999 perekonomian negara-negara di Asia Tenggara dan Timur mulai mengalami perbaikan setelah IMF turun tangan melakukan intervensi atas sejumlah sektor ekonomi.⁴²

Malaysia, Korea Selatan dan Thailand merupakan contoh negara-negara di Asia yang paling cepat keluar dari krisis, meskipun belum mencapai kondisi seperti sebelum terjadi krisis. Kalau di Indonesia sendiri situasinya berbeda. Situasi keamanan dan politik yang tidak kondusif seperti gejolak di Aceh, Irian Jaya, dan Maluku ini telah menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁴³

Bahaya disintegrasi bangsa dan negara yang berhadapan dengan kecenderungan baru di kalangan negara-negara Barat- baik melalui PBB maupun bentuk kerjasama lainnya melakukan intervensi keamanan, kalau perlu dengan kekuatan militer. Jika Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan penyelesaian politik atas masalah di Aceh, Maluku, Irian Jaya misalnya, maka hal ini akan memberi peluang bagi negara-negara Barat, terutama LSM-LSM Barat, maupun elemen-elemen separatis didalam negeri untuk mendesak masyarakat internasional agar melakukan intervensi keamanan yang tentu saja akan melanggar kedaulatan Indonesia.

Pemulihan citra positif Indonesia atas apa yang telah terjadi selama ini merupakan prioritas utama dalam misi diplomasi, terutama masalah mengenai penegakan hukum, stabilitas keamanan, pelanggaran HAM, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan pokok permasalahan yang dapat menghambat pemulihan citra Indonesia di mata dunia Internasional. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil sikap untuk mengatasi masalah-masalah seperti disintegrasi, salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah melaksanakan secara sungguh-sungguh UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah, selain itu di

⁴² Baca tulisan Funabashi lebih lanjut " *The Asianization of asia* ", dalam Foreign Affairs. Desember 1993, hal. 84

⁴³ Ibid, hal.130

upaya juga adalah keharmonisan sikap antara para elit politik termasuk pejabat negara dalam menyikapi masalah penting negara.⁴⁴

Walaupun pelaksanaan UU No. 22 ini belum dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah di Aceh, Papua dan Maluku untuk merdeka, maka pendekatan integral dan multidimensional sangat diperlukan, seperti proses dialog yang pernah dilakukan dengan faksi-faksi GAM yang di sponsori oleh Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue (HDC) telah berlangsung sejak Januari 2000, tepatnya tanggal 12 Mei 2000. Proses tersebut telah menghasilkan *Joint Understanding Humanitarian Pause for Aceh* (kesepakatan bersama mengenai jeda kemanusiaan untuk Aceh). Adapun kesepakatan tersebut meliputi usaha bersama baik untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan maupun pengurangan ketegangan dan penghentian kekerasan di Aceh.⁴⁵

Negara-negara ASEAN tetap mengharapkan peran Indonesia terlepas dari masalah-masalah dalam negeri yang dihadapi Indonesia. Indonesia perlu mencegah kesan seolah-olah telah menjadi negara yang *inward-looking*, karena belakangan ini peran Indonesia dalam kengah organisasi ASEAN mulai dipertanyakan, baik dikalangan dalam negeri maupun luar negeri. Tidak seperti masa sebelum krisis ekonomi, peran regional Indonesia di forum ASEAN amat menonjol, bahkan sempat dijuluki *Big Brother* di kalangan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Ketika krisis ekonomi melanda kawasan ini, kohesivitas dan integritas ASEAN dalam menghadapi dampak sosial dari krisis ini mulai diragukan karena negara-negara ASEAN dipandang lebih sibuk mencari solusi penanggulangan krisis sendiri-sendiri mengingat kompleksitas dari tingkat krisis yang dialami masing-masing negara berbeda satu sama lainnya, termasuk Indonesia yang dianggap paling parah dan paling lambat pemulihannya. Hal ini secara tidak langsung menyulitkan Indonesia untuk memprtahankan peran regionalnya, apalagi Malaysia, Thailand relatif telah berhasil keluar dari krisis.⁴⁶

⁴⁴ Ibid, hal 32-34

⁴⁵ Ibid, hal.35

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- After David E. 1987. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: PT. LP3ES
- Allagappa, Mutiah dan A. Slapinno, Robert. 1998. *Comperhensive Security Interpretation in ASEAN country*. University of calivornia.
- Bakry, Umar Suryadi. 1999. *Pengantar Hubungan internasional*. Jakarta : Jaya Baya University Press.
- Bilveer, Singh. 1995. *The Callange of Conventional Aru Proliferation in southes*. Jakarta: LP3ES
- Cobb, and Eider. 1998. *Teori-teori sosial Modern*. Jakarta Rajawali press.
- Dhakidae, daniel. 2001. Aceh, Jakarta, Papua : *Akar Masalah dan Alternatif Proses Penyelesaiaan Konflik*. Jakarta : YAPPIKA.
- Eisenmenn, Charless dan The Liang Gie. 1994. *Ilmu Politik*. Gajah Mada University Press.
- Giddens, Anthony. 2000. *Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Habib, Hasnan A. 1998. *Efek Krisis Ekonomi terhadap Peran dan Tanggung Jawab Indonesia Bagi Upaya Mewujudkan Stabilitas Kawasan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, Ignitus. 1999. *Kejahatan Negara" Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Haryanto. 2001. *Penanganan Masalah Aceh dalam Kerangka NKRI*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Idris, Safwan. 2001. *Pemberian Kewenangan Khusus kepada Daerah rawan Disintegrasi dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhanas.
- Ishak, Syanmsudin. 2000. *Dari Ma'af ke Panik Aceh*. Jakarta : YAPPIKA
- J.J. Kusni. 2001. *Negara Etnik : " Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak"*. Yogyakarta : FUSFAD(Forum Study Perubahan dan Peradaban).

- Koosyah dan Lukman Hakim. 2000. *Lintasan Sejarah Keistimewaan Aceh*. Jakarta: Pengurus Besar Al- Jamiswashliyah.
- Koentjoroningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mas' oed, Muchtar. 1997. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Gajah mada University.
- Myrdal, Gunnar. 1991-1992. *Asia Tenggara Pasca Kamboja Antisipasi Indonesia*. Laporan Penelitian Litbang dan Deplu- Universitas Air langga . Surabaya.
- Paribtra, Sukchumbad. 1998. *Preparing ASEAN For Twenty Country : The Indonesia Quertly*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Prasetyo, Edi. 1990. *Masalah Perluasan Treaty of Amity Cooperation (TAC)*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Sihbudi, Riza dan Mizan. 2001. *Bara dalam Sekam : Indonesia Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-konflik Lokal di Aceh, Jakarta, Papua*. Bandung.
- Sekretariat, Jenderal DPR-RI. 1999-2000. *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman wahid*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi(P31). Jakarta.
- The Liang Gie. 1978. *Ilmu Politik*. Yogyakarta. Gajah Mada University.
- The Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik, Pengertian, Kedudukan, Lingkup, dan Metodologi*. Bandung: CV. Tarsito.

Penerbitan Berkala:

- Analisis CSIS No. 40 Tahun 1998 Jakarta
- Analisis CSIS No. 4 Tahun 1999 Jakarta
- Analisis CSIS No. 4 Tahun 2000 Jakarta
- Analisis CSIS, No. 1 Tahun 2001. Jakarta
- Jurnal Ilmu Politik No. 40 tahun 2001

Majalah-majalah :

Asia Week, 19 November 1999
Gatra, 20 November 1999
Suara Hidayatullah, 8 Juli, Tahun 2000
Suara 9 April 2000
Tempo, 16 September 2001

Surat Kabar :

Jawa Post, 1 January 2000
Jawa Post, 23 Juli 2001
Jawa post, 8 November 2001
Kompas 25 Mei 1997
Kompas 17 Februari 2000
Kompas 23 January 2001
Kompas 27 January 2001
Kompas, 9 Agustus 2001
Kompas 24 November 2001
Suara Pembaruan 5 November 2001
Media Indonesia 24 April 1998
Suara Karya 12 Nopovember 1999

Website

Indonesia Permanen Mission, Genewa . www.3.itu.ind\Missions\ind\news\news\cpoII22.Menlu.Htm
Departemen of Foregin Affairs. www.dfa-deplu.Gov.id\policy\statement\menlu\spechees\esppmat.

Southeast Asia Map



